

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 km<sup>2</sup>. Banyuwangi masih merupakan daerah kawasan hutan karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,349 ha atau sekitar 31,72%; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%; perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan lain-lainnya. Selain penggunaan luas daerah yang demikian itu, Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta jumlah Pulau ada 10 buah. Seluruh wilayah tersebut telah memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi penduduk Kabupaten Banyuwangi.

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Batas wilayah Kabupaten Banyuwangi yaitu:

- a) Sebelah utara adalah Kabupaten Situbondo,
- b) Sebelah timur adalah Selat Bali,
- c) Sebelah selatan adalah Samudera Indonesia, dan
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso.



**Gambar 3. Peta Administratif Kabupaten Banyuwangi**

*Sumber: RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015*

Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak di antara 70 43' - 80 46' Lintang Selatan dan 1130 53' - 1140 38' Bujur Timur.

Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada

umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 400, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya.

Dataran yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 150, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai sehingga bisa menambah tingkat kesuburan tanah. Dataran rendah yang terbentang luas dari selatan hingga utara di mana di dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS, sehingga di samping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah. Dalam Tabel 4 berikut ini, akan dapat diketahui nama dan panjang DAS di Kabupaten Banyuwangi:

**Tabel 4. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Banyuwangi**

No.	Nama DAS	panjang (m)	No.	Nama DAS	panjang (m)
1	D.A.S Bajulmati	48.906	19	D.A.S Bomo	49.007
2	D.A.S Sodong	2.850	20	D.A.S Blambangan	128.634
3	D.A.S Widoro Porong	6.869	21	D.A.S Komis	10.250
4	D.A.S Curah Alas Buluh	2.222	22	D.A.S Setail	189.540
5	D.A.S Selogiri	6.173	23	D.A.S Blambangan	222.128
6	D.A.S Sebani	2.782	24	D.A.S Kaligung	-
7	D.A.S Paleran	6.086	25	D.A.S Sarongan	-
8	D.A.S Dani	5.391	26	D.A.S Kandangan	-
9	D.A.S Ketapang	14.492	27	D.A.S Lembu	1.250
10	D.A.S Kali Klatak	25.832	28	D.A.S Trembelang	6.000
11	D.A.S Sukowidi	31.252	29	D.A.S Bangorejo	-
12	D.A.S K. Banyuwangi	37.041	30	D.A.S Besar	-
13	D.A.S Bendo	36.257	31	D.A.S Kedungrejo	8.000
14	D.A.S Pakis	7.043	32	D.A.S Karang bendo	-
15	D.A.S Tambong	100.403	33	D.A.S Kemut	-
16	D.A.S Donosuka	13.773	34	D.A.S Gambiran	65.000
17	D.A.S Lungun	16.666	35	D.A.S Bulu agung	55.000
18	D.A.S Binau	68.244			

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyuwangi, 2010

Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 24 kecamatan, 28 kelurahan dan 189 desa. Dengan jumlah desa terbanyak di Kecamatan Rogojampi sebanyak 18 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tegaldlimo dengan luas 1341,12 Ha, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Giri dengan luas 21,31 Ha. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

**Tabel 5: Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa**

Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	
		(Km <sup>2</sup> )	(%) thd total
1. Pesanggaran	Sarongan, Kandangan, Sumberagung, Pesanggaran, Sumbermulyo	802,5	13,9
2. Siliragung	Buluagung, Siliragung, Seneporejo, Kesilir, Barurejo	95,15	1,6
3. Bangorejo	Sukorejo, Ringintelu, Sambirejo, Sambimulyo, Temurejo, Bangorejo, Kebondalem	137,43	2,4
4. Purwoharjo	Grajagan, Sumberasri, Glagahagung, Karetan, Bulurejo, Purwoharjo, Sidorejo, Kradenan	200,3	3,5
5. Tegaldlimo	Purwoasri, Kendalrejo, Kedungasri, Kedungwungu, Tegaldlimo, Wringinpitu, Kedunggebang, Purwoagung, Kalipait	1.341,12	23,2
6. Muncar	Sumberberas, Wringinputih, Kedungringin, Tambakrejo, Tapanrejo, Blambangan, Kedungrejo, Tembokrejo, Sumbersewu, Kumendung	146,07	2,5
7. Cluring	Sembulung, Tampo, Plampangrejo, Kaliploso, Benculuk, Cluring, Tamanagung, Sraten, Sarimulyo	97,44	1,7
8. Gambiran	Purwodadi, Jajag, Wriinginagung, Wringinrejo, Yosomulyo, Gambiran	66,77	1,2
9. Tegalsari	Karangdoro, Karangmulyo, Tegalsari, Dasri, Tamansari, Tegalrejo	65,23	1,1
10. Glenmore	Karangharjo, Tulungrejo, Sumbergondo, Bumiharjo, Sepanjang, Tegalharjo, Margomulyo	421,98	7,3
11. Kalibaru	Kebonrejo, Kalibaru Manis, Banyuanyar, Kalibaru Kulon, Kalibaru Wetan, Kajarharjo	406,76	7,0
12. Genteng	Kaligondo, Setail, Genteng Kulon, Genteng Wetan, Kembiritan	82,34	1,4
13. Srono	Sumbersari, Kepundungan, Kebaman, Sukonatar, Bagorejo, Rejoagung, Wonosobo, Sukomaju, Parijatah Wetan, Parijatah Kulon	100,77	1,7
14. Rogojampi	Aliyan, Mangir, Kaligung, Karangrejo, Bomo, Gintangan, Gladag, Bubuk, Kedaleman, Lemahbangdewo, Rogojampi, Kaotan, Watukebo, Patoman, Blimbing Sari, Karangbendo, Gitik, Pengantigan	102,33	1,8
15. Kabat	Bareng, Bunder, Gombolirang, Benelan Lor, Labanasem, Pakistaji, Badean, Sukoajati, Pondoknongko, Dadapn, Kedayunan, Kabat, Macanputih, Tambong, Pendarungan, Kalirejo	107,48	1,9

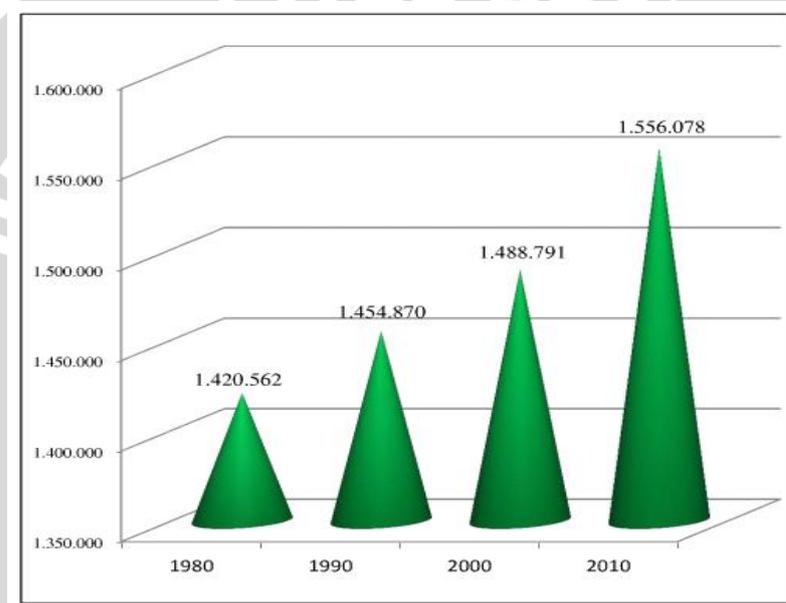
Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	
		(Km <sup>2</sup> )	(%) thd total
17 Sempu	Sempu, Tegalarum, Jambewangi, Temuasri, Karang Sari, Temuguruh, Gendoh	174,83	3,0
18 Songgon	Bedewang, Balak, Bangunsari, Songgon, Parangharjo, Sragi, Sumber Arum, Srmber Bulu, Bayu	301,84	5,2
19. Glagah	Paspas, Glagah, Olehsari, Rejosari, Bakungan, Banjarsari, Kemiren, Tamansuruh, Kenjo, Kampunganyar	76,75	1,3
20. Licin	Pakel, Kluncing, Segobang, Jelun, Gumuk, Banjar, Licin, Tamansari	169,25	2,9
21. Banyuwangi	Pakis, Sobo, Kebalenan, Penganjuran, Tukangkayu, Kertosari, Karangrejo, Kapatihan, Panderejo, Singonegaran, Temenggungan, Kampung Melayu, Kampung Mandar, Lateng, Singotrunan, Pengantigan, Sumberejo, Taman Baru	30,13	0,5
22. Giri	Jambesari, Boyolangu, Mojopanggung, Penataban, Giri, Grogol	21,31	0,4
23. Kalipuro	Bulusari, Pesucen, Telemung, Kelir, Kalipuro, Klatak, Ketapang, Gombengsari, Bulusan	310,03	5,4
24. Wongsorejo	Bangsring, Bengkak, Alasbulu, Wongsorejo, Alasrejo, Sumberkencono, Sidowangi, Sidodadi, Bajulmati, Watukebo, Sumberanyar, Bimorejo	464,8	8,0
JUMLAH :		5.782,50	100

Sumber : Banyuwangi Dalam Angka, 2011

Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan Jember. Tidaklah mengherankan kalau Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur. Di samping potensi di bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat. Dengan bentangan pantai yang cukup panjang, dalam perspektif ke depan, pengembangan

sumberdaya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut.

Jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, dapat dilihat pada gambar grafik 4 yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banyuwangi menurut sensus penduduk yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali:



**Gambar 4. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Banyuwangi**

*Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012*

Pada tahun 1980 jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi menunjukkan angka 1.420.562 penduduk, pada tahun 1990 jumlah ini meningkat menjadi 1.454.870, dan terus meningkat di tahun 2002 yang menunjukkan angka sebesar 1.488.791 penduduk. Pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 1.556.078 penduduk.

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Banyuwangi bekerja di bidang pertanian, kehutanan, perburuan, dan di bidang perikanan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 6 yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Banyuwangi tahun 2012:

**Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012**

Lapangan Usaha (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	185.369	113.715	299.084
Pertambangan dan Penggalian	8.982	2.706	11.688
Industri Pengolahan	51.029	53.819	104.848
Listrik, Air, dan Gas	852	0	852
Bangunan	72.349	0	72.349
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	83.495	125.388	208.883
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	26.213	2.763	28.976
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	8.890	6.327	15.217
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	50.006	49.414	99.420

*Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012*

Dapat disimpulkan dari tabel 4 bahwa sebagian besar yaitu 299.084 penduduk bekerja di bidang pertanian, kehutanan, perburuan, dan di bidang perikanan. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk yang bekerja pada bidang perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel yang menunjukkan angka 209.993 penduduk.

Dapat dikatakan sektor pertanian yang mendominasi dalam struktur ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi sebagai penghasil kedelai terbesar di Jawa Timur. Bila dibandingkan dengan produksi kedelai, jagung dan padi nasional. Berikut tabel yang menunjukkan data yang diperoleh dari website

resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 tentang produktifitas padi, jagung, dan kedelai Banyuwangi berada diatas rata-rata nasional:

**Tabel 7. Perbandingan Hasil Produksi Tingkat Nasional antara Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Jenis Tanaman Tahun 2011-2012**

No.	Tempat Hasil Produksi	Jenis Tanaman	Tahun 2011	Tahun 2012
1.	Nasional	Padi	4,9 ton per hektar	5,1 ton per hektar
		Jagung	4,5 ton per hektar	4,7 ton per hektar
		Kedelai	1,36 ton per hektar	1,37 ton per hektar
2.	Banyuwangi	Padi	6,5 ton per hektar	6,3 ton per hektar
		Jagung	6,4 ton per hektar	6,4 ton per hektar
		Kedelai	1,8 ton per hektar	2,1 ton per hektar

*Sumber: website resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2013*

Dapat disimpulkan pada tahun 2011, produktifitas padi nasional hanya 4,9 ton per hektar, produktifitas padi Jawa Timur sebesar 5,4 ton per hektar, sedangkan di Banyuwangi mencapai 6,5 ton per hektar. Tahun 2012 produktifitas padi nasional meningkat menjadi 5,1 ton per hektar di bawah Banyuwangi yang mencapai 6,3 ton per hektar. Produktifitas jagung tahun 2011 sebesar 6,4 ton per hektar melampaui rata-rata produktifitas nasional yang hanya 4,5 ton per hektar. Pada tahun 2012 produktifitas jagung nasional meningkat menjadi 4,7 ton per hektar tetapi juga masih di bawah Banyuwangi yang mencapai 6,4 ton per hektar. Sedangkan produktifitas kedelai Banyuwangi tahun 2011 sebesar 1,8 ton per hektar melampaui rata-rata produktifitas nasional yang hanya 1,36 ton per hektar. Pada tahun 2012 produktifitas kedelai nasional meningkat menjadi 1,37 ton per hektar tetapi juga masih jauh di bawah Banyuwangi yang mencapai 2,1 ton per

hektar. Produksi padi di Banyuwangi pada tahun 2011 sebesar 761,3 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) menduduki ranking 2 Jawa Timur setelah Jember, produksi jagung mencapai 189,4 ribu ton, dan produksi kedelai 66,1 ribu ton. Hingga September 2012, produksi padi tercatat mencapai 567 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG), produksi jagung mencapai 112,1 ribu ton, dan produksi kedelai 26,4 ribu ton. Berikut tabel yang dapat menggambarkan penjabaran perbandingan hasil produksi Kabupaten Banyuwangi dengan hasil produksi tingkat nasional.

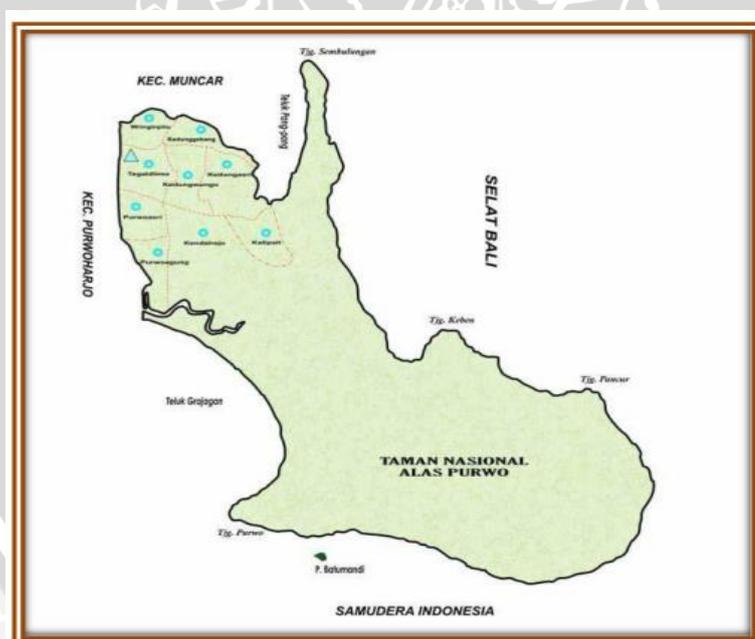
#### **4.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Tegaldlimo**

Tegaldlimo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Tegaldlimo adalah kecamatan paling ujung di Kabupaten Banyuwangi, terletak di Kabupaten Banyuwangi dan bisa di tempuh kurang lebih 50 Km dari pusat Kabupaten Banyuwangi atau 1,5 jam melalui darat menggunakan motor atau mobil. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kecamatan Tegaldlimo terletak di antara  $114^{\circ} 20' - 114^{\circ} 36'$  BT  $08^{\circ} 25' - 08^{\circ} 47'$  LS. Desa Wringinpitu merupakan batas kecamatan Tegaldlimo di belahan utara. Desa Wringinpitu berbatasan langsung dengan tiga kecamatan yaitu Kecamatan Purwoharjo (di barat), kecamatan Cluring (di utara) dan Kecamatan Muncar (sebelah timur laut). Batas utara berupa sungai Setail.

Luas wilayah Kecamatan Tegaldlimo sekitar  $80,51 \text{ km}^2$ . Kecamatan Tegaldlimo mempunyai wilayah yang terdiri dari 9 wilayah dengan status pedesaan. kelima wilayah desa tersebut antara lain Purwoasri, Kendalrejo,

Kedungasri, Kedungwungu, Tegaldlimo, Wringinpitu, Kedunggebang, Purwoagung dan Kalipait dalam wilayah Kecamatan Tegaldlimo terdapat dua sungai yang melintasi, yaitu sungai kalipait dan sungai mbangeran bermanfaat mengairi hamparan sawah yang luas. selain ketersediaan hamparan sawah yang cukup luas dan potensial itu kontribusi daerah aliran sungai (DAS) mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kesuburan tanah.

Kecamatan Tegaldlimo dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota/bupati melalui sekretaris kota administras/kabupaten administrasi. sedangkan desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa. Berikut gambar Peta Kecamatan Tegaldlimo.



**Gambar 5. Peta Administratif Kecamatan Tegaldlimo**

*Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012*

Di Kecamatan Tegaldlimo terdapat 9 (Sembilan desa/kelurahan) Selama periode 2010 – 2011, jumlah desa tidak ada perubahan. ditingkat pemerintahan desa masih terdapat pembagian wilayah lagi yaitu dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). di kecamatan tegaldlimo terdapat 26 wilayah dusun/ lingkungan; 58 rukun warga (RW); dan 400 Rukun Tetangga (RT). selain itu setiap desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Tegaldlimo masing-masing dipimpin oleh seorang kepala desa dengan pendidikan yang terakhir ditamatkan minimal SLTP. Berikut tabel yang menunjukkan desa yang terdapat di Kecamatan Tegaldlimo.

**Tabel 8. Desa/Kelurahan Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012**

Desa / Kelurahan	Dusun / Lingkungan	Jumlah	
		R.W	R.T
(1)	(2)	(3)	(4)
Purwoasri	3	6	37
Kendalrejo	3	4	39
Kedungasri	3	6	32
Kedungwungu	3	6	56
Tegaldlimo	4	10	65
Wringinpitu	3	11	57
Kedunggebang	3	6	48
Purwoagung	2	5	28
Kalipait	2	4	38
<b>J u m l a h</b>	<b>26</b>	<b>58</b>	<b>400</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012*

**1) Desa Purwoasri :**

Desa Purwoasri pada awalnya adalah sebuah Desa hasil pemekaran dari Desa Grajagan yang Kepala Desanya bernama Tirto Samudro. Desa Purwoasri asal mulanya sebuah pedukuhan yang diberi nama Tegalsari. Kemudian pada sekitar tahun 1940 atas kesepakatan seluruh Warga maka wilayah yang tadinya bernama Tegalsari dirubah menjadi Desa Purwoasri. Sedangkan yang menjadi Kepala Desa Pertama adalah Bapak Sujak. Nama Purwoasri diambil karena pada zaman dulu kawasan ini adalah hutan belantara yang masih satu kawasan dengan hutan Purwo yang sangat lebat namun kelihatan indah dan asri, maka jadilah nama Purwoasri.

Jumlah RT : 37 (Tiga Puluh Tujuh)

Jumlah RW : 6 (Enam)

Jumlah Dusun : 3 (Tiga), Jumlah Nama Dusun :

- (1) Kalisari
- (2) Tegalsari Lor
- (3) Tegalsari Kidul

**2) Desa Kendalrejo :**

Pada Tahun 1929 – 1930 datanglah sekelompok orang yang berasal dari Jogjakarta dan mintak ijin babat kepada Pemerintah Kolonial Belanda, setelah ijindirestui mereka saling gotong royong membabat hutan yang banyak ditumbuhi pohon kendal, setelah membabat hutan mereka saling membentuk lahan untuk ditanami berbagai macam tanaman dan juga sebagai tempat tinggal, maka daerah tersebut oleh Petinggi Desa Grajagan diberinama Kendalrejo, karena pada waktu babat hutan bnyak ditumbuhi pohon kendal. Pada tahun 1933 daerah tersebut

masih tergabung dalam lingkup Desa Grajagan dengan Petinggi Desa Bernama Bapak Tirto Samudro, oleh Petinggi Grajagan diangkatlah seorang Kamituwo Padukuhan Kendalrejo yaitu Bapak Potro Hardjo. Pada tahun 1936 padukuhan Kendalrejo menjadi Desa Kendalrejo hasil Pemekaran dari Desa grajagan, dan langsung melaksanakan Pemilihan Petinggi Desa dengan calon sebanyak sembilan (9) calon dan yang terpilih sebagai petinggi Desa yaitu Kamituwo yang bernama Bapak Potro Hardjo. Dengan demikian dapat diasumsikan kuat, bahwa asal usul nama Kendalrejo pada tahun 1930, karena sekelompok orang yang berasal dari Jogjakarta membabat hutan yang banyak ditumbuhi pohon Kendal. Dan berdirinya Desa Kendalrejo tahun 1936 dengan petinggi Desa bernama Bapak Potro Hardjo.

Jumlah RT : 39 (Tiga Puluh Sembilan)

Jumlah RW : 4 (Empat)

Jumlah Dusun : 3 (Tiga), Jumlah Nama Dusun :

(1) Kaliagung

(2) Pandanrejo

(3) Paluagung

### 3) Desa Kedungasri :

Pada jaman dahulu sekitar tahun 1915 diwilayah Kabupaten Banyuwangi bagian selatan, tepatnya disebelah barat dataran tinggi Gunung Linggamanis diwilayah Taman Nasional Alas Purwo terdapat sebuah dataran yang banyak digenangi air yang di beri nama Desa Kedungwungu. Desa kedungwungu memiliki wilayah padukuhan, salah satunya adalah padukuhan yang bernama

Dusun Kedungasri. Konon padukuhan tersebut diberi nama Kedungasri karena dahulu didaerah tersebut banyak ditumbuhi tanaman mendong yaitu sejenis tanaman yang biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan tikar, daerah tersebut suasananya sangat teduh serta asri sehingga nyaman untuk tempat beristirahat. Oleh penduduk setempat kemudian dinamakan Kedungasri berasal dari kedung yang berasal dari bahasa jawa berarti genangan air yang cukup luas, dan asri yang berarti teduh, indah dan nyaman. Pada tahun 1969 terjadilah pemecahan Desa Kedungwungu menjadi Desa Kedungasri yang pada saat itu Desa Kedungwungu dipimpin oleh kepala desa yang bernama Bapak Mukandar.

Pada awal berdirinya Kedungasri, yang ditunjuk sebagai pejabat sementara ( PJS ) kepala desa Kedungasri sampai dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga Desa Kedungasri adalah babinsa Desa Kedungwungu yaitu Bapak Bores. Kemudian pada tahun 1971, untuk pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kedungasri. Sebagai calon tunggal adalah Bapak Bores, hingga kemudian terpilih secara resmi dilantek menjadi kepala Desa Kedungasri yang pertama.

Jumlah RT : 32 (Tiga Puluh dua)

Jumlah RW : 6 (Enam)

Jumlah Dusun : 3 (Tiga). Jumlah Nama Dusun :

- (1) Dambuntung
- (2) Persen
- (3) Pondokasem

#### 4) Desa Kedungwungu :

Pada zaman dahulu sekitar tahun 1915 diwilayah Kabupaten Banyuwangi bagian selatan tepatnya disebelah barat datarn tinggi gunung lingga manis diwilayah Taman Nasional Alas Purwo terdapat sebuah dataran yang banyak digenangi air salah satunya adalah Desa Kedungwungu, Konon Pedukuhan tersebut dinamakan Kedungwungu karena dahulukala diderah tersebut terdapat Pohon Kepuh yang sangat besar dan rindang sekali dan dibawah pohon tersebut terdapat sebuah kedung yang ada sumber mata airnya dan disekitarnya banyak tumbuh tanaman bunga yang warnanya Wungu, Maka oleh penduduk setempat, tempat tersebut dinamakan Desa Kedungwungu.

Jumlah RT : 56 (Lima Puluh Enam)

Jumlah RW : 6 (Enam)

Jumlah Dusun : 3 (Tiga). Jumlah Nama Dusun :

- (1) Kaliwungu
- (2) Gempol Dampit
- (3) Sumberkepuh

#### 5) Desa Tegaldlimo

Sekitar Tahun 1915 diwilayah Kabupaten Banyuwangi bagian Selatan sungai setail ± 3 km terdapat dataran rendah dengan luas wilayah 1. 393,035 H /1.093 Km dengan suh udara rata-rata 27° C, ketinggian dari permukaan laut ± 12 m, curah hujan 1000 - 2000 mm pertahun merupakan hutan belantara dengan pepohonan yang sangat lebat, namun diantara pepohonan yang sangat lebat tersebut banyak ditemukan pohon delima sehingga dipakai sebagai Julukan/

tetenger Tegaldlimo. Sesuai dengan perkembangan zaman, pada awal terbentuknya Desa tahun 1931 diberinama DesaTegaldlimo dan yang ditunjuk oleh Masyarakat sebagai Pejabat sementara (PJS) Kepala Desa Tegaldlimo adalahMangun Diharjo sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga Desa Tegaldlimo pada tahun 1966.

Jumlah RT : 65 (Enam Puluh Lima)

Jumlah RW : 10 (Sepuluh)

Jumlah Dusun : 4 (Empat), Jumlah Nama Dusun :

- (1) Sumberluhur
- (2) Sumbermulyo
- (3) Sumberdadi
- (4) Sumberrejo

**6) Desa Wringinpitu :**

Tertulis atau terdengar cerita daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang menghijau diatas tanah yang datar ditumbuhi pohon dan semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk dalam kehidupan primitif karena disekitar sekelompok masyarakat tersebut terdapat tujuh (7) pohon beringin yang sangat lebat, maka dinamakan Desa Wringinpitu begitu orang menyebutnya, Desa Wringinpitu lama kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di desa tersebut, Desa Wringinpitu sudah terkenal dikalangan Penduduk atau Desa sekitar bahkan terdengar sampai keluar Kota Kabupaten. Konon cerita didesa ini ada dua (2) ekor harimau yang berbulu putih dan yang satunya berwarna hitam dan tempat

berlindungnya antara satu dengan yang lain kurang lebih 2km, anehnya dari kedua makhluk ini tidak pernah mengganggu masyarakat bahkan sebaliknya terkesan membantu terutama menjaga keamanan di Desa Wringinpitu, maka sampai saat ini tempat kedua makhluk itu diyakini masyarakat sebagai tempat yang dikeramatkan dan setiap ada acara tahunan di Desa Wringinpitu tempat tersebut untuk acara selamatan (Tumpengan). Mengingat keyakinan masyarakat bahwa mbah ireng dan mbah putih ( sebutan untuk kedua harimau tersebut) adalah merupakan danyang dari Desa Wringinpitu.

Jumlah RT : 57 (Lima Puluh Tujuh)

Jumlah RW : 11 (Sebelas)

Jumlah Dusun : 3 (Tiga), Jumlah Nama Dusun :

- (1) Ringinanom
- (2) Ringinasri
- (3) Bayatrejo

#### **7) Desa Kedunggebang :**

Pada zaman dahulu sekitar tahun 1927 diwilayah Kabupaten Banyuwangi bagian selatan, tepatnya disebelah barat dataran tinggi semenanjung sembulungan dan sebelah barat teluk pang-pang terdapat dataran rendah yang diberi nama desa Kedunggebang. Asal nama Desa Kedunggebang dari kata Kedung artinya di wilayah desa dulu ada telaga yang ditumbuhi tanaman gebang (tanaman famili pohon palem). Desa Kedunggebang memiliki dua padukuhan yaitu kampung empat (4) dan kampung enam (6), pada ± tahun 1927 ada empat (4) orang antara lain: Rono joyo, Saodjoyo, Ranudjoyo, Roidjoyo.

Keempat orang tersebut berasal dari mataram Jawa Tengah, lalu membuka hutan sekitar tahun 1927 yang sampai dengan sekarang oleh orang dahulu dinamakan Desa Kedunggebang.

Jumlah RT : 48 (Empat Puluh Delapan)

Jumlah RW : 6 (Enam)

Jumlah Dusun : 3 (Tiga), Jumlah Nama Dusun :

(1) Damtelu

(2) Krajan

(3) Kedungsumur

**8) Desa Purwoagung :**

Asal usul nama Purwoagung konon sejarahnya diujung timur Desa Purwoagung ada tempat pedukuhan ± 65 Kepala Keluarga yang diberi nama Paluagung yang berbatasan dengan perkebunan milik belanda yang dikenal orang dengan nama Erpa. Kedua wilayah tersebut dibatasi dengan Pal / Patok besar yang bernama kuning, jadi nama desa Purwoagung secara historis diambilkan dari salah satu wilayah / tempat yang berada di Desa Purwoagung. Desa Purwoagung merupakan penjelmaan atau pecahan dari Desa Purwoasri pada tanggal 4 Oktober 2001, yang diprakarsai oleh tokoh masarakat desa yang disebut MLD. Pada waktu itu diketuai oleh seorang pemimpin yang bernama Abdullah Marjono, BA. Nama purwoaggung secara historis diambil dari bahasa jawa kuno yakni Purwo dan Agung.

Jumlah RT : 28 (Dua Puluh Delapan)

Jumlah RW : 5 (Lima)

Jumlah Dusun : 2 (Dua) Jumlah Nama Dusun :

- (1) Asembagus
- (2) Gladakkembar

**9) Desa Kalipait :**

Pada zaman dahulu sekitar tahun 1935 diwilayah Kabupaten Banyuwangi bagian selatan, tepatnya disebelah barat dataran tinggi Gunung Lingga manis di wilayah taman Nasional Alas Purwo terdapat sebuah dataran yang banyak ditumbuhi pohon Kendal yang banyak dan kemudian diberi nama Desa Kendalrejo. Desa Kendalrejo memiliki wilayah beberapa padukuhan, salah satunya adalah padukuhan yang bernama Dusun Kalipait. Konon padukuhan tersebut diberi nama Kalipait karena dahulu didaerah tersebut banyak mengalir sungai-sungai kecil yang airnya sangat asin sangat asinnya rasanya sampai pait, daerah tersebut suasananya sangat teduh serta asri sehingga nyaman untuk tempat beristirahat. Oleh penduduk setempat kemudian dinamakan Kalipait, berasal dari kata sungai yang airnya sangat asin karena sangat asin rasanya sampai pait. Dalam perkembangan selanjutnya Dusun Kalipait berkembang menjadi sebuah Desa yang mandiri dan lepas dari Desa Kendalrejo. Pemecaha Desa Kendalrejo menjadi dua (2) Desa yaitu Desa Kendalrejo sebagai Desa induk dan Desa Kalipait sebagai Desa pecahannya terjadi pada tanggal 21 Oktober 2001.

Jumlah RT : 38 (Tiga Puluh Delapan)

Jumlah RW : 4 (Empat)

Jumlah Dusun : 2 (Dua)

Jumlah Nama Dusun : Purworejo dan Kutorejo

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Tegaldlimo bekerja di bidang pertanian, hal ini dapat dilihat pada tabel 9 yang menunjukkan jumlah masyarakat berdasarkan jenis lapangan usaha di Kecamatan Tegaldlimo menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi tahun 2013:

**Tabel 9. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Jenis Lapangan Usaha di Kecamatan Tegaldlimo Tahun 2012**

Desa / Kelurahan	Jenis Lapangan Usaha			
	Pertanian	Tambang	Industri	Dagang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Purwoasri	1.309	0	38	89
Kendalrejo	1.369	0	74	331
Kedungasri	2.140	0	66	179
Kedungwungu	2.134	0	37	97
Tegaldlimo	2.039	0	379	146
Wringinpitu	2.053	0	187	260
Kedunggebang	2.650	0	1.549	349
Purwoagung	1.046	0	27	96
Kalipait	1.779	0	40	120
<b>Jumlah</b>	<b>16.519</b>	<b>0</b>	<b>2.397</b>	<b>1.667</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012*

Berdasarkan tabel 9 dapat disimpulkan bahwa 16.519 penduduk bekerja pada bidang pertanian dibandingkan dengan memilih bekerja di bidang industri yang hanya menunjukkan angka sebesar 2.397 penduduk dan bidang dagang yang menunjukkan angka 1.667 penduduk.

### **4.1.3. Gambaran Umum Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi**

#### **4.1.3.1 Sejarah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi**

Secara historis Nama atau Nomenklatur Dinas Pertanian sepanjang berdirinya senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan political will pemerintahan saat itu. Sebelum masa reformasi Dinas Pertanian berdiri sendiri dengan nama Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Selanjutnya pada masa reformasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah pertama kali menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau dikenal dengan Otonomi Daerah, nomenklturnya berubah menjadi Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2004.

Kemudian pada tahun 2009 melalui penetapan Perda Nomor 11 Tahun 2009 nomenklatur berubah menjadi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan. Selanjutnya melalui penetapan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 nomenklatur dinas berubah kembali menjadi Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan. Berdasarkan historis berdirinya SKPD diatas, bahwa sejak diberlakukannya otonomi daerah tidak terlepas dari adanya regulasi tentang Organisasi Perangkat Daerah yang sering mengalami perubahan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi urusan pemerintahan yang menekankan pada

prinsip efektivitas dan efisiensi atau dengan kata lain kaya fungsi dan miskin struktur.

Melalui pola tersebut kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi lebih ramping karena dilakukan penggabungan atau merger dengan beberapa dinas atau urusan. Semangat menggabungkan beberapa dinas juga dilandasi agar prinsip-prinsip koordinasi antar sektor dapat berjalan lebih efektif yang pada akhirnya terwujud adanya sinergitas atau keterpaduan program pembangunan. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan mempunyai dua urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian dan Kehutanan.

#### **4.1.3.2 Visi dan Misi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi**

Adapun visi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi. Visi adalah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam RPJMD.

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan serta menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 – 2015, maka visi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015 adalah : “Terwujudnya Petani Yang Berakhlak Mulia dan Sejahtera Melalui Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan yang berdaya saing Tinggi, berkelanjutan dan Lestari”

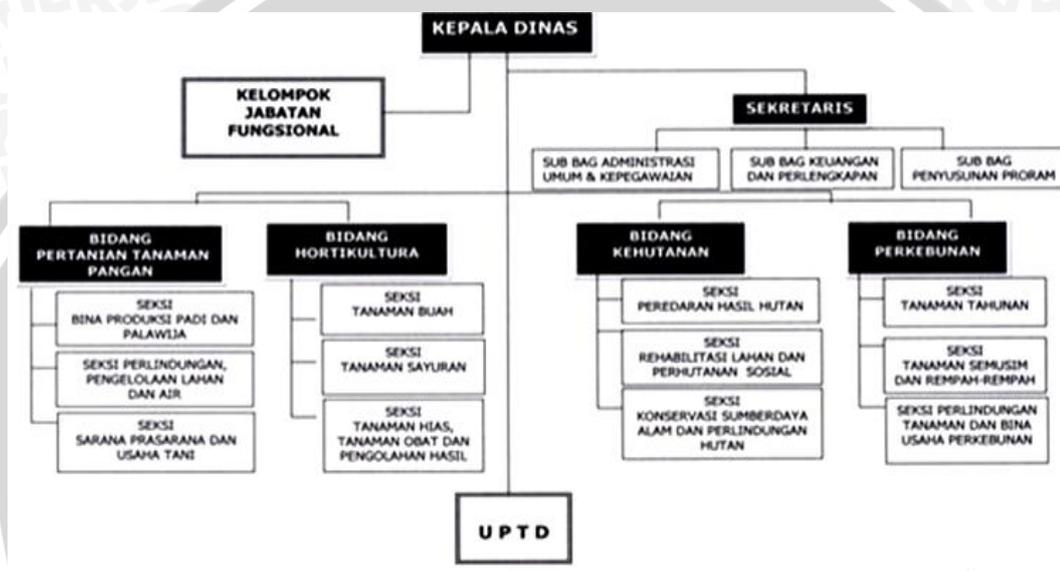
Makna Visi yaitu Melalui upaya peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia pertanian, hortikultura, perkebunan dan kehutanan yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan dan lestari, maka diharapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan akan terwujud petani memiliki daya tawar tinggi dan berpendapatan tinggi sehingga meningkat kesejahteraannya.

Sedangkan Misi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi SKPD. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta visi, maka misi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, dan kontinuitas produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan.
- 2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan kehutanan.
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani/gabungan kelompok tani.

- 4) Meningkatkan daya dukung sumberdaya hutan dan lahan berdasarkan azas manfaat dan lestari.

#### 4.1.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi



**Gambar 6. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi**

Sumber: <http://distanhutbun.banyuwangikab.go.id/>

Berdasarkan Perda Kab.Banyuwangi No.6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan;
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Para pegawai yang bekerja di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Banyuwangi Ada Sekitar 66 Orang, dan yang menangani tentang Pertanian Tanaman Pangan ada sekitar 15 orang, Semua Pegawai Rata-rata memiliki pendidikan Sarjana Pertanian. Di BPP Kecamatan Tegaldlimo ada 10 orang sebagai Ketua Koordinator dan sebagai PPL. 2 Orang Bertugas Di UPTD.

**A. Bidang Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas:**

Bidang Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan usaha bidang pertanian tanaman pangan meliputi upaya peningkatan produksi, pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, penyuluhan pengenalan teknologi pertanian dan pendataan;

**Bidang Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi:**

- 1) Pelaksanaan usaha pencegahan, pengendalian organisme pengganggu tanaman padi dan palawija;

- 2) Pelaksanaan penyuluhan pertanian tanaman pangan dalam rangka usaha peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pendapatan masyarakat serta organisasi atau koperasi tani;
- 3) Pengenalan dan mengusahakan teknologi pertanian, alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
- 4) Perencanaan kebutuhan sarana produksi (benih dan pupuk);
- 5) Pengumpulan data angka-angka statistik di bidang pertanian tanaman pangan;
- 6) Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas:**

- 1) Menyusun rencana Bidang Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- 2) Merencanakan dan melaksanakan upaya-upaya peningkatan produksi tanaman pangan (padi dan palawija);
- 3) Melaksanakan usaha pencegahan, pengendalian organisme pengganggu tanaman padi dan palawija;
- 4) Melaksanakan penyuluhan pertanian tanaman pangan dalam rangka usaha peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pendapatan masyarakat serta organisasi atau koperasi tani;
- 5) Mengenalkan dan mengusahakan teknologi pertanian, alat dan mesin pertanian tanaman pangan;

- 6) Merencanakan kebutuhan sarana produksi (benih dan pupuk);
- 7) Mengumpulkan data angka-angka statistik di bidang pertanian tanaman pangan;
- 8) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan air;
- 9) Mengidentifikasi dan melaporkan akibat dari bencana alam;
- 10) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 11) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 13) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

**B. Kepala Seksi Bina Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas:**

- 1) Menyusun rencana Seksi Bina Produksi Padi dan Palawija sesuai dengan rencana kerja dinas;
- 2) Melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- 3) Mengolah dan mendokumentasikan data dasar dan data hasil pembangunan di bidang pertanian tanaman pangan;
- 4) Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pertanian tanaman pangan;
- 5) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun rencana teknis dalam bidang bina produksi padi dan palawija;

- 6) Melakukan bimbingan di bidang pengembangan teknologi produksi padi dan palawija;
- 7) Melakukan pemantauan, penilaian, evaluasi dan pelaporan program intensifikasi padi dan palawija;
- 8) Melaksanakan pengelolaan dan penyusunan data statistik pertanian dan pelaporan program intensifikasi tanaman pangan;
- 9) Melaksanakan pengkajian dan demonstrasi teknologi spesifik lokasi;
- 10) Merencanakan dan melaksanakan upaya-upaya peningkatan produksi tanaman pangan;
- 11) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 12) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 14) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

**C. Kepala Seksi Perlindungan, Pengelolaan Lahan dan Air, mempunyai tugas:**

- 1) Menyusun rencana Seksi Perlindungan, Pengelolaan Lahan dan Air sesuai dengan rencana kerja dinas;
- 2) Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu serta bencana alam;

- 3) Melaksanakan pengawasan peredaran penyimpanan dan penggunaan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hama gudang serta usaha rehabilitasi lahan kritis, pengendalian erosi dan kesuburan tanah;
- 4) Melaksanakan bimbingan usaha pengembangan teknis penggunaan air, bimbingan dalam pengelolaan air irigasi yang efisien dan pengembangan sumber air;
- 5) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis usaha perluasan lahan dan usaha-usaha pertanian tanaman pangan di wilayah pengembangan lahan;
- 6) Melaksanakan program pengembangan penerapan pertanian organik dalam mendukung sistem pertanian berkelanjutan termasuk pengembangan dan pemanfaatan agen hayati atau bahan organik lainnya;
- 7) Melakukan pemantauan, penilaian, evaluasi dan pelaporan program perlindungan tanaman dan pengelolaan lahan dan air;
- 8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

**D. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Tani, mempunyai****tugas:**

- 1) Menyusun rencana Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Tani sesuai dengan rencana kerja dinas;
- 2) Melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sarana prasarana dan usaha tani;
- 3) Mengkenalkan penggunaan benih berlabel;
- 4) Melaksanakan sosialisasi dan penyebaran teknologi terapan/aplikasi pupuk berimbang;
- 5) Memberikan informasi tentang pupuk dan pestisida terdaftar dan diizinkan penggunaannya;
- 6) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang benih tanaman pangan;
- 7) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pupuk dan pestisida yang terdaftar, izin penggunaannya dan peredarannya;
- 8) Melaksanakan sosialisasi sumber-sumber permodalan baik perbankan maupun non perbankan;
- 9) Melakukan bimbingan di bidang pengembangan sarana prasarana berupa peralatan dan mesin pertanian;
- 10) Memberikan pembinaan tentang penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan;
- 11) Melaksanakan analisa usaha tani dan bimbingan teknis manajemen usaha tani;

- 12) Melakukan bimbingan di bidang pengembangan usaha tani;
- 13) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 14) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 16) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## **4.2. Penyajian Data**

### **4.2.1 Pengembangan LERD (Local Economic Resource Development) dalam bidang Pertanian Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi**

#### **4.2.1.1 Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Yang Dipengaruhi Oleh Sektor Pertanian**

Kondisi ekonomi Kabupaten Banyuwangi mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahunnya sejak tahun 2006 yaitu sebesar 4,74 %. Kondisi ini terus meningkat pada tahun 2006–2010, pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi sebesar 6,22 %. Hal ini dapat dilihat pada besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) tahun 2010 mencapai 11.099.055,81 juta rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 10.439.329,31 juta rupiah. Angka pendapatan per kapita kabupaten Banyuwangi tahun 2010 sebesar Rp. 6.101.969,78. Perkembangan pendapatan per-kapita kabupaten Banyuwangi tahun 2006 – 2010 dapat dilihat selengkapnya dalam tabel 10 berikut ini:

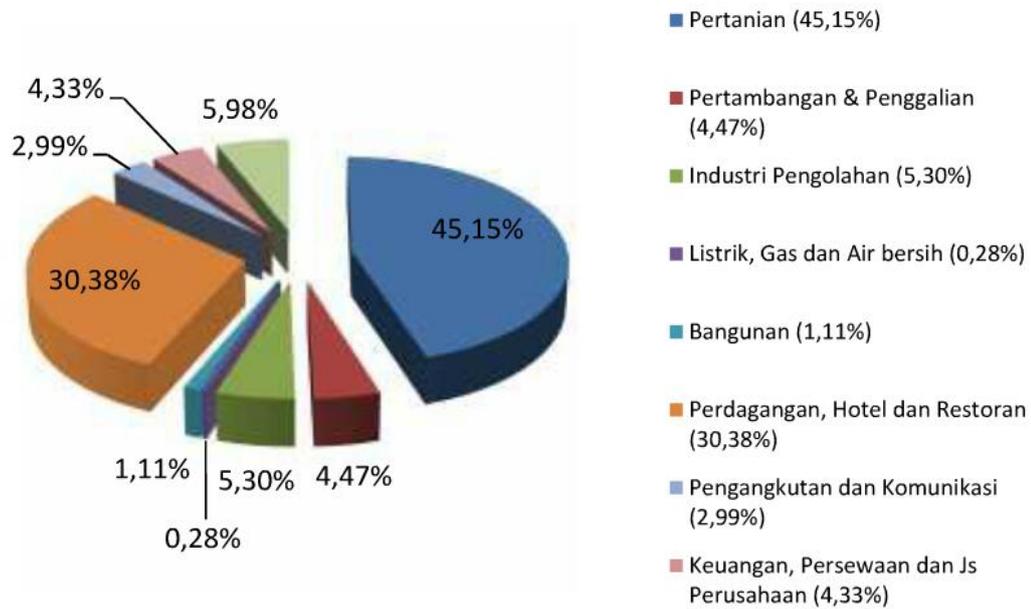
**Tabel 10. Data perekonomian umum  
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006-2010**

No	Deskripsi	2006	2007	2008	2009	2010
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	PDRB harga konstan (struktur perekonomian) (juta Rp.)	8.815.927,14	9.309.065,68	9.845.052,99	10.439.329,31	11.099.055,81
2	Pendapatan Perkapita Kabupaten (Rp.)	5.278.626,88	5.573.482,58	5.786.538,69	5.904.876,54	6.101.969,78
3	Upah Minimum Regional Kabupaten (Rp.)	720.000	775.000	785.000	810.000	824.000
4	Inflasi (%)	10,24	8,36	10,14	6,71	7,41
5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,74	5,75	5,92	6,15	6,22

Sumber : Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2011

Tingkat Inflasi tahun 2010 sebesar 7,41%. Laju Inflasi di kabupaten Banyuwangi terkategori pada tingkat inflasi ringan yaitu dibawah 10%, yang diharapkan akan member dampak positif pada perekonomian Kabupaten Banyuwangi yaitu mendorong perekonomian lebih baik, membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi.

Hampir separuh dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Banyuwangi bergerak di bidang Pertanian dengan luas tanah persawahan sekitar 66.152 Ha atau sekitar 11,44% sehingga mempunyai pengaruh terhadap struktur ekonomi sebesar 45,15%. Sektor ekonomi kedua yang mempunyai peranan terbesar adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan besar sumbangannya terhadap perekonomian Kabupaten Banyuwangi sebesar 30,38%. Berikut Diagram yang dapat menggambarkan tentang kondisi perekonomian di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012:



**Gambar 7. Grafik Kondisi Perekonomian di Kabupaten Banyuwangi Pada Tahun 2012**

Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013

Angka Pertumbuhan Ekonomi sering digunakan sebagai salah satu indikator penting dalam mengkaji kinerja ekonomi suatu daerah, apabila semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan semakin baik kinerja ekonomi daerah tersebut.

Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Banyuwangi masih sangat besar. Rata-rata masih sekitar 50% setiap tahunnya. Hal ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Hanya saja, potensi semacam itu belum dimanfaatkan secara baik karena produk-produk pertanian masih belum terkait secara baik dengan produk-produk olahan. Manakala produk-produk pertanian itu diolah, akan memiliki nilai tambah tersendiri dan akan menjadi sumber daya saing bagi Kabupaten Banyuwangi

#### **4.2.1.2 Kondisi Komoditas Tanaman Kedelai Berbasis LERD (Local Economic Resource Development) Di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi**

Sentra kedelai Banyuwangi berlokasi di 8 kecamatan dan 60 desa meliputi Kecamatan Purwoharjo (8 desa) Bangorejo (7 desa), Gambiran (6 desa), Cluring (9 desa), Srono (10 desa), Muncar (9 desa), Tegaldlimo (9 desa), Pesanggaran (5 desa), dan Silir Agung (5 desa). Di daerah-daerah tersebut para petani menanam kedelai 2 kali dalam setahun dengan pola tanam padi – kedelai – kedelai. Peningkatan produksi kedelai berdampak positif terhadap peningkatan rata-rata pendapatan petani kedelai dari Rp 3,22 juta per hektar pada tahun 2008 menjadi Rp 4,52 juta perhektar pada tahun 2010. (<http://www.setkab.go.id/pro-rakyat-1627-penguatan-banyuwangi-sebagai-lambung-kedelai-jatim.html>)

Sentra kedelai di Kabupaten Banyuwangi salah satunya berada di Kecamatan Tegaldlimo karena produktivitas/hasil produksi yang dihasilkan oleh kecamatan ini dapat mencukupi kebutuhan komoditas dan pangan nasional setiap tahunnya. Sesuai yang telah disebutkan bahwa Kecamatan Tegaldlimo merupakan penghasil terbesar tanaman kedelai yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 11 yang menunjukkan produktivitas tanaman kedelai di Kecamatan Tegaldlimo dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi:

**Tabel 11. Luas Panen, Rata-rata Produksi dan Total Produksi Kedelai Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011**

NO.	Kecamatan/ Districts	Kecamatan/ Districts	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Pesanggaran	4.392	18,02	7.914
2	Siliragung	2.9	18,76	5.541
3	Bangurejo	2.507	18,51	4.641
4	Purwoharjo	7.57	18,17	13.752
<b>5</b>	<b>Tegaldlimo</b>	<b>7.617</b>	<b>18,19</b>	<b>13.853</b>
6	Muncar	3.778	18,04	6.817
7	Cluring	1.644	20,02	3.291
8	Gambiran	1.506	17,90	2.695
9	Tegalsari	991	16,46	1.631
10	Glenmore	0	0,00	0
11	Kalibaru	0	0,00	0
12	Genteng	84	18,93	159
13	Srono	1.106	19,90	2.201
14	Rogojampi	683	19,77	1.35
15	Kabat	250	19,08	477
16	Singojuruh	14	17,86	25
17	Sempu	300	19,00	570
18	Songgon	124	14,11	175
19	Glagah	0	0	0
20	Licin	0	0	0
21	Banyuwangi	4	17,50	7
22	Giri	0	0	0
23	Kalipuro		18,50	37
24	Wongsorejo		18,25	958
Jumlah/Total 2011		36.068	18,32	66.094
2010		36.912	17,57	64.857
2009		37.677	17,21	64.852

Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi

Dari tabel 11 menunjukkan luas panen, rata-rata produksi dan total produksi kedelai menurut kecamatan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011 menunjukkan bahwa Kecamatan Tegaldlimo menjadi sentra kedelai terbesar apabila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Tegaldlimo menunjukkan produktivitas tanaman kedelai sebesar 13.853 ton pada tahun 2011 dan selanjutnya diikuti dengan Kecamatan Purwoharjo dengan produktivitas tanaman kedelai sebesar 13.752 ton pada tahun 2011.

Kecamatan Tegaldlimo adalah kecamatan paling ujung di Kabupaten Banyuwangi, terletak di Kabupaten Banyuwangi dan bisa di tempuh kurang lebih 50 Km dari pusat Kabupaten Banyuwangi atau 1,5 jam melalui darat menggunakan motor atau mobil. Kecamatan Tegaldlimo bisa juga di sebut lumbung padinya Kabupaten Banyuwangi, roda pertanian terus bergerak di kecamatan ini yaitu hasil produksi pertanian yang berupa padi, kedelai, semangka, jeruk, dan melon yang tumbuh subur. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak M. Hadi Purnomoo selaku Dinas Kehutanan di Kabupaten Banyuwangi yang mengatakan “Iya betul, Karena Kecamatan Tegaldlimo memang menjadi sentra Kedelai, dan Lahan lahan yang ada juga lahan sentra kedelai. Namun, sebenarnya kecamatan tegaldlimo juga penghasil padi terbesar juga”. Selain itu menurut pendapat Bapak Komar selaku Penyuluh Pertanian Kecamatan Tegaldlimo mengatakan:

“Iya, Kedelai merupakan komoditi utama karena di Jawa Timur 40% kedelai yang diproduksi dihasilkan oleh Kecamatan Tegaldlimo, dengan ini dapat dilihat bahwa Kecamatan tegaldlimo memang penghasil kedelai terbesar Di Jawa Timur. Kenapa Kecamatan Tegaldlimo bisa menjadi pemasok

Kedelai terbesar di jawa timur yak arena potensi wilayah Tegaldlimo yang sangat mendukung dan Topografi serta SDM yang sangat mendukung juga” (wawancara dilakukan pada tanggal 04 Mei 2014 pukul 11.15 WIB)

Lebih lanjut menurut Bapak Komar selaku Penyuluh Pertanian Kecamatan Tegaldlimo mengatakan “Banyak kecamatan-kecamatan lain yang juga menghasilkan kedelai, contohnya Kecamatan Purwoharjo. Namun Kecamatan Tegaldlimo merupakan yang diprioritaskan sebagai penghasil kedelai terbesar, karena memang wilayahnya yang mendukung”. Berikut tabel 12 yang menunjukkan hasil produktivitas tanaman kedelai per-kelurahan/desa di Kecamatan Tegaldlimo:

**Tabel 12. Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Kedelai Per-Desa Kelurahan Tahun 2012**

Desa / Kelurahan	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (kuintal/ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
Purwoasri	417	1,75	729,75
Kendalrejo	444	1,72	763,68
Kedungasri	1.316,00	1,74	2.289,84
Kedungwungu	786	1,7	1.336,20
Tegaldlimo	1.130,00	1,76	1.988,80
Wringinpitu	492	1,68	826,56
Kedunggebang	536	1,7	911,2
Purwoagung	608	1,78	1.082,24
Kalipait	614	1,74	1.068,36
<b>J u m l a h</b>	<b>6.343,00</b>	<b>1,73</b>	<b>10.996,63</b>

*Sumber: Kantor Kecamatan Tegaldlimo tahun 2013*

Pada tabel 12 menunjukkan bahwa setiap kelurahan di Kecamatan Tegaldlimo mempunyai produktivitas yang tinggi. Hasil produksi kedelai di Tegaldlimo pada tahun 2012 menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 menunjukkan produktivitas 10.996,63 kuintal/ha pertahunnya. Dapat disimpulkan dari tabel 12, Kelurahan Kedungsari adalah kecamatan penghasil kedelai terbesar di antara kecamatan yang lainnya, yaitu menunjukkan produktivitas sebesar 2.289,84, sedangkan Kelurahan Tegaldlimo menunjukkan produktivitas sebesar 1.988,80. Dan diikuti dengan kelurahan-kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Tegaldlimo. Berikut gambar yang menunjukkan perkebunan kedelai di salah satu kelurahan Kecamatan Tegaldlimo.



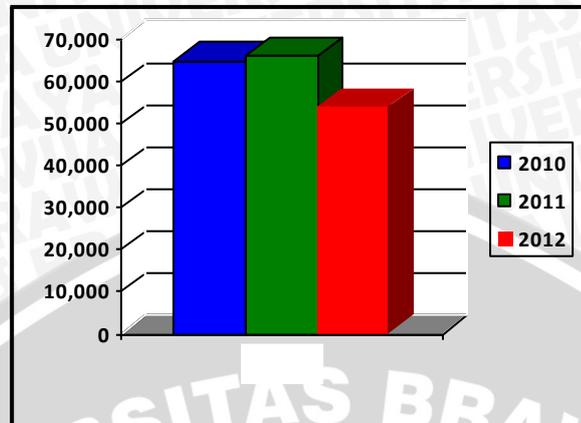
**Gambar 8. Kondisi Perkebunan Kedelai di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi**

*Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2013*

Gambar kedelai tersebut menunjukkan tingkat kesuburan kedelai yang berada di salah satu kelurahan di Kecamatan Tegaldlimo. Namun meskipun begitu tingginya produktivitas tanaman kedelai yang dihasilkan oleh Kecamatan Tegaldlimo, kemakmuran hasilnya hanya dapat dirasakan oleh yang memiliki ladang pertanian luas. Sedangkan petani yang tidak memiliki lahan hanya dapat merasakan apabila masa panen tiba. Hal tersebut juga di taggapi oleh Bapak Widiwongso selaku Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Tegaldlimo

“iya betul, Dengan adanya Program-program dari Pemerintah ini memang hasil panen menjadi sangat memuaskan dan berkualitas. Dan dapat dinikmati hasilnya oleh para petani kita sekarang, utamanya bagi petani yang memiliki lahan pertanian yang luas. Dan bagi petani yang lahannya sempit atau buruh-buruh tani, keuntungan ini hanya bisa dinikmati jika musim panen datang saja”.(Wawancara dilaksanakan pada 03 Mei 2014 pukul 10.00 WIB)

Selain itu adapun permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Banyuwangi sebagai penghasil kedelai terbesar di Jawa Timur, pada tahun 2010 produksi tanaman kedelai dapat mencapai 64.857 ton, dan pada tahun 2011 produksinya mencapai 66.094 ton, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 53.648 ton.



**Gambar 9. Produksi Kedelai Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2012**

*Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi. 2013*

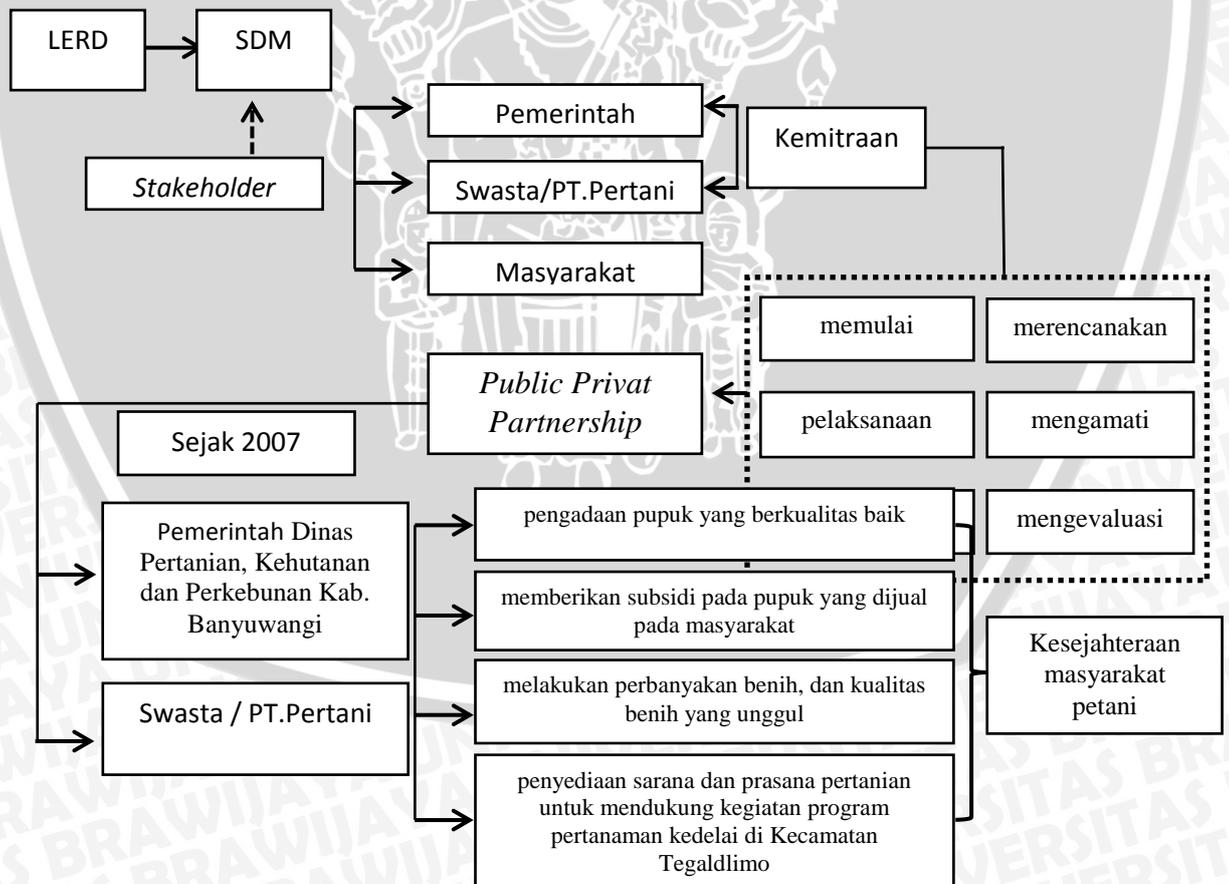
Salah satu penyebab terjadinya penurunan areal tanam kedelai adalah harga kedelai yang tidak berpihak pada petani, sehingga petani beralih ke tanam jagung atau jeruk yang jauh lebih menguntungkan. (Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan. 2013)

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Banyuwangi khususnya pada Kecamatan Tegaldlimo, adapun program-program yang direncanakan maupun dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi serta didukung oleh pihak swasta yaitu PT.Pertani dalam meningkatkan produktivitas di bidang pertanian khususnya untuk tanaman kedelai di Kecamatan Tegaldlimo.

**4.2.2 Pelaksanaan PPP (*Public Privat Partnership*) dalam pengembangan kedelai di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi berbasis LERD (*Local Economic Resource Development*)**

**4.2.2.1 Proses terjadinya PPP (*Public Privat Partnership*) di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi**

Berikut bagan alur terjadinya PPP (*Public Privat Partnership*) yang merupakan sebuah kemitraan untuk pengembangan kedelai di Kecamatan Tegaldlimo,



**Gambar 10. bagan alur terjadinya PPP di Kecamatan Tegaldlimo**

Sumber: Peneliti



Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal erat kaitannya dengan pemberdayaan sumberdaya manusianya, lembaganya dan lingkungan sekitarnya. Untuk mengembangkan sumberdaya ekonomi lokal tidak cukup hanya dengan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusianya, tetapi juga diperlukan adanya lembaga yang terlatih untuk mengelola sumberdaya manusia yang sudah maju, dan memerlukan lingkungan yang kondusif untuk memungkinkan lembaga ekonomi lokal tersebut berkembang. Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal melalui pengembangan lembaga kemitraan semua *stakeholders* (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dengan demikian membutuhkan kemampuan komunikasi diantara semua lembaga yang bersangkutan yang menjamin kesinambungan mitra kerja dan mitra usaha.

Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal erat kaitannya dengan pemberdayaan sumberdaya manusianya, lembaganya dan lingkungan sekitarnya. Untuk mengembangkan sumberdaya ekonomi lokal tidak cukup hanya dengan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusianya, tetapi juga diperlukan adanya lembaga yang terlatih untuk mengelola sumberdaya manusia yang sudah maju, dan memerlukan lingkungan yang kondusif untuk memungkinkan lembaga ekonomi lokal tersebut berkembang. Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal melalui pengembangan lembaga kemitraan semua *stakeholders* (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dengan demikian membutuhkan kemampuan komunikasi diantara semua lembaga yang bersangkutan yang menjamin kesinambungan mitra kerja dan mitra usaha.

Peran pemerintah sebagai aktor tunggal dalam pembangunan daerah pedesaan tidak dapat memecahkan masalah dalam pembangunan daerah pedesaan, sehingga membutuhkan peran dari sektor swasta yang memiliki kemampuan dan memberikan dukungan dalam pembangunan daerah pedesaan. Dengan ini maka dibutuhkan adanya Tahapan awal yang harus dilakukan dalam kemitraan, meliputi: memulai, merencanakan, pelaksanaan, mengamati, mengendalikan, dan mengevaluasi. Dengan demikian para aktor akan dengan mudah menjalankan PPP (*Public Privat Partnership*).

Peran Pemerintah yang berwenang atau bertanggung jawab atas permasalahan dibidang pertanian di Kabupaten Banyuwangi adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan yang mengimplementasikan dua urusan pilihannya yaitu Urusan Pertanian dan Kehutanan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi bertanggung jawab atas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan. Untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada pada bidang pertanian khususnya, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi mempunyai visi sebagai berikut: “Terwujudnya Petani Yang Berakhlak Mulia dan Sejahtera Melalui Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan yang berdaya saing Tinggi, berkelanjutan dan Lestari”

Makna Visi yaitu Melalui upaya peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia pertanian, hortikultura, perkebunan dan kehutanan

yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan dan lestari, maka diharapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan akan terwujud petani memiliki daya tawar tinggi dan berpendapatan tinggi sehingga meningkat kesejahteraannya. Dalam tabel 13 akan dijabarkan tentang rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015, sebagai berikut:

**Tabel 13. Keterkaitan (Interelasi) Visi, Misi, Tujuan & Sasaran dengan Rencana Strategis Tahun 2010-2015 Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi**

<p><b>VISI</b> : <i>Terwujudnya Petani Yang Berakhlak Mulia dan Sejahtera Melalui Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan Yang Berdaya Saing Tinggi, berkelanjutan dan Lestari.</i></p>							
<p><b>MISI I</b> : Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan.</p>							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1 (2011)	2 (2012)	3 (2013)	4 (2014)	5 (2015)
Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas padi/palawija, komoditas unggulan hortikultura, perkebunan dan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya produktivitas padi per hektar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktivitas padi (Ku/ha)</li> </ul>	63,76	65,03	66,33	67,65	69,03
	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi sektor pertanian pada PDRB (%)</li> </ul>	49,25	49,27	49,30	49,37	49,10
	Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) pada PDRB</li> </ul>	8,99	9,05	9,12	9,15	9,17
	Meningkatnya kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi produksi kelompok petani pada PDRB (%)</li> </ul>	3,69	3,86	4,03	4,20	4,36

Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)</li> </ul>	1,06	1,07	1,07	1,08	1,09
--	---	------	------	------	------	------

**MISI II :** Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
Meningkatkan penanganan pasca panen produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani (%)	110,55	110,65	110,75	111	111,5

**MISI III :** Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani/gabungan kelompok tani

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani/gabungan kelompok tani	Meningkatnya cakupan bina kelompok tani	cakupan bina kelompok tani (%)	26,05	26,15	26,55	26,75	26,95

**MISI IV :** Meningkatkan Daya Dukung Sumberdaya Hutan dan Lahan berdasar azas manfaat dan lestari

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
Meningkatkan fungsi hutan dan lahan	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	rehabilitasi hutan dan lahan (%)	1,03	1,05	1,07	1,09	1,10
	Menurunnya kerusakan kawasan hutan	kerusakan kawasan hutan (%)	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03

Sumber: Rencana Strategis Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015

Dapat disimpulkan dalam rencana strategis Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi memiliki misi: (1) Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan. (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan. (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani/gabungan kelompok tani. (4) Meningkatkan Daya Dukung Sumberdaya Hutan dan Lahan berdasar azas manfaat dan lestari. Dalam menjalankan rencana strategisnya, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi tidak bekerja sendirian. Karena selain pemerintah yang berwenang atau bertanggung jawab atas permasalahan khususnya dibidang pertanian di Kabupaten Banyuwangi, pemerintah juga didampingi oleh pihak swasta dan peran serta masyarakat.

Dengan adanya ketiga sektor penting ini, maka pelaksanaan PPP (*Public Privat Partnership*) akan berjalan dengan baik. Pihak swasta yang membantu Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi adalah PT.Pertani. PT.Pertani mempunyai tugas dalam meningkatkan produktivitas di bidang pertanian khususnya untuk tanaman kedelai di Kecamatan Tegaldlimo dengan berkontribusi dalam pemberian pupuk dan bantuan lainnya yang akan dibahas dalam Program-program yang dilaksanakan dalam pelaksanaan PPP (*Public Privat Partnership*) di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi pada sub-bab berikutnya.

PPP (*Public Privat Partnership*) di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi telah ada sejak tahun 2007. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah

berkerjasama dengan pihak swasta yaitu PT.Pertani, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Moch. Djamroni selaku WIBI Kecamatan Tegaldlimo yang mengatakan:

“Pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta mulai dari tahun 2007. Jadi kerjasama didalamnya seperti ini PSO kerjasama dengan Dinas. Dinas memiliki kebun bibit, tempatnya ada di Kedungringin dan Muncar. PSO nya adalah PT. Pertani. Kerjasama berupa pengadaan pupuk yang berkualitas baik, dan memberikan subsidi pada pupuk yang dijual pada masyarakat. Dan secara khususnya, pemerintah melakukan perbanyakan benih, dan kualitas benih yang unggul. Karena di Kabupaten Banyuwangi sendiri Pengadaan Benih ini hanya dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu saja, dan salah satunya di Kecamatan Tegaldlimo ini.”  
(wawancara dilakukan pada tanggal 02 Mei 2014 pukul 10.15 WIB)

Kerjasama ini hanya berjalan di tempat-tempat tertentu saja, dan salah satunya di Kecamatan Tegaldlimo, hal ini karena Kecamatan Tegaldlimo merupakan salah satu sentra kedelai terbesar di Kabupaten Banyuwangi. Dapat disimpulkan bahwa pihak swasta yang berkerjasama dengan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi tidak hanya PT.Pertani, hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Drs. Ahmad Laini, M.Si sebagai Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Banyuwangi:

“Pemerintah melalui PP menugaskan kementerian terkait untuk menjalankan suatu program untuk masyarakat, biasanya di sebut PSO (Public Service Obligation) dan dalam hal ini untuk departemen pertanian bias berbentuk Benih Subsidi, Pupuk Subsidi dll. Dan dalam hal inidepartemen pertanian menunjuk perusahaan untuk menjalankannya. Contoh untuk pupuk subsidi ditunjuklah PT Pupuk Indonesia untuk melaksanakannya, dan kami pertain sebagai distributor untuk penyaluran pupuk. Contoh untuk Benih subsidi departemen pertanian menunjuk PT Pertani untuk menjalankannya. Tapi kalau program perluasan pertanaman kedelai kami hanya sebagai penyedia sarana pertanian untuk mendukung kegiatan tersebut”. (wawancara dilakukan pada tanggal 02 Mei 2014 pukul 15.15 WIB)

Diadakannya kerjasama antara pemerintah khususnya Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dan PT.Pertani dijelaskan oleh Bapak Moch. Djamroni selaku WIBI Kecamatan Tegaldlimo seta coordinator penyuluh yang mengatakan:

“Diadakannya kerjasama ini, karena untuk menopang kebutuhan pengembangan kedelai salah satunya adalah dengan adanya kerjasama ini, tidak adanya penyedia benih dan pupuk yang baik selain pihak swasta ini. *Kan* jika Benih diambil dari produk yang bagus, pupuk yang bagus, dan harga lebih murah dari harga pasar maka petani juga akan tidak terlalu berat untuk membeli. Begitu juga hasil panennya pasti juga akan lebih bagus dan unggul. Dan yang di dapatkan oleh pemerintah juga banyak, adanya upaya dalam peningkatan hasil produknya, peningkatan pendapatan, utamanya pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah, jika pendapatan dan luas lahan meningkat, maka masyarakat juga akan sejahtera, maka meningkatlah kesejahteraan masyarakatnya”. (wawancara dilakukan pada tanggal 02 Mei 2014 pukul 15.15 WIB)

Pentingnya ketiga sektor yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat masing-masing memberikan kontribusi yang sangat besar dan berpengaruh dalam pengembangan kedelai. Hal ini sependapat dengan pihak swasta Bapak Arief Gunawan selaku Kasi Operasional PT. Pertani mengatakan:

“Sebenarnya semua pihak sangat berkontribusi pada program ini, baik pemerintah melalui dinas pertanian dan penyuluh sebagai pemilik program, petani sebagai pelaksana dan pengambil manfaat, serta kami pihak perusahaan yang menyumbangkan produk dan teknologinya untuk program ini. Jadi tidak bisa di katakana hanya kami lah yang paling berperan”. (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014 pukul 12.15 WIB)

Berikut gambar 11 yang menunjukkan proses koordinasi antara Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dan PT.Pertani sebelum memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi,

yang nantinya akan diserahkan kepada camat masing-masing kecamatan untuk proses implementasinya.



**Gambar 11. Rapat Koordinasi antara Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dan PT.Pertani**

*Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi. 2013*

Proses kerjasama ini lalu akan dijabarkan dalam program-program yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan swasta dalam sub-bab berikut ini.

#### **4.2.2.2 Program-Program yang dilaksanakan dalam Pelaksanaan PPP antara Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dan PT. Pertani Sebagai Pihak Swasta dalam Pengembangan Kedelai Berbasis LERD di Kecamatan Tegaldlimo.**

Peran pemerintah yang berwenang dan atau memiliki fungsi dalam bidangn tanaman pangan adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Banyuwangi khususnya bidang pertanian tanaman pangan. Namun seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa pemerintah tidak bekerja sendiri dalam pengembangan kedelai di Kecamatan Tegaldlimo. Disini berarti ada pihak lain yang terkait dalam mendukung program-program pemerintah. Kecamatan Tegaldlimo mempunyai sektor swasta bernama PT. Pertani, diharapkan dengan adanya sektor swasta dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pengembangan kedelai di Kecamatan Tegaldlimo dapat memberikan hasil maksimal seperti hasil produktivitas yang semakin meningkat dan memperbaiki perekonomian para petani agar menjadi lebih baik.

Peran swasta disini seperti dapat memberikan pupuk, benih serta obat kepada petani dengan harga murah dan kualitas yang baik, selain itu pihak swasta juga ikut dalam memberikan penyuluhan kepada para petani dalam memberikan cara bagaimana menanam kedelai dengan baik. Sedangkan peran pemerintah yaitu Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi berharap kerjasama dengan pihak swasta ini agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh petani seperti mahalnya harga pupuk dan benih kedelai. Selain itu Pemerintah juga secara rutin memberikan sekolah lapang dan penyuluhan kepada para petani, upaya ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para petani tentang cara menanam kedelai yang baik sehingga dapat menghasilkan kedelai yang berkualitas baik. Selanjutnya akan dijabarkan lebih terperinci program-program atau kegiatan pemerintah yaitu Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi khususnya pada bidang pertanian tanaman pangan yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan usaha pencegahan, pengendalian organisme pengganggu tanaman padi dan palawija;
- 2) Pelaksanaan penyuluhan pertanian tanaman pangan dalam rangka usaha peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pendapatan masyarakat serta organisasi atau koperasi tani;
- 3) Pengenalan dan mengusahakan teknologi pertanian, alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
- 4) Perencanaan kebutuhan sarana produksi (benih dan pupuk);
- 5) Pengumpulan data angka-angka statistik di bidang pertanian tanaman pangan;
- 6) Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2011)

Adapun program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian dalam program atau kegiatan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi khususnya pada bidang pertanian mulai tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi kegiatan :
  - a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis ;
  - b. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis ;
  - c. Peningkatan kemampuan lembaga ;
  - d. Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok petani.
  - e. Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur.

Kegiatan ini dapat dilihat pada gambar 10 yang menunjukkan adanya pelatihan dan penyuluhan langsung oleh pihak swasta yaitu PT. Pertani. Berikut gambar yang dapat menjelaskan keadaan sebenarnya di lapangan, dimana gambar 11 menjelaskan tentang penyuluhan dan pendampingan langsung oleh pemerintah kepada kelompok petani dan pelaku agribisnis yaitu pihak swasta PT. Pertani.



**Gambar 12. Penyuluhan dan Pendampingan Langsung oleh Pemerintah Kepada Kelompok Petani dan Pelaku Agribisnis di Kecamatan Tegaldlimo**

*Sumber: Peneliti*

Sedangkan dalam memberikan materi kepada kelompok petani untuk dapat lebih memanfaatkan lahan dan produktivitas hasil perkebunan. Berikut gambar yang dapat menjelaskan keadaan sebenarnya di lapangan, dimana gambar 12 menjelaskan tentang pemberian materi dan penyuluhan seputar kemampuan lembaga/masyarakat yang dilakukan pemerintah kepada kelompok petani dan pihak swasta di Kecamatan Tegaldlimo.



**Gambar 13. Pemberian Materi Dan Penyuluhan Seputar Kemampuan Lembaga/Masyarakat yang Dilakukan Pemerintah Kepada Kelompok Petani dan Pihak Swasta di Kecamatan Tegaldlimo**

*Sumber: Kantor Kecamatan Tegaldlimo tahun 2012*

Adanya program ini diperuntukkan agar kelompok petani dapat memaksimalkan hasil maupun kemampuannya dalam mengelola tanaman kedelai, sehingga produksi yang akan dihasilkan semakin meningkat. Hal ini sependapat seperti yang dikatakan oleh Bapak Antok Hadi sebagai Ketua Gapoktan Kecamatan Tegaldlimo yang mengatakan:

“Tujuan program ini dikembangkan adalah agar hasil produksi kedelai Kecamatan Tegaldlimo dapat semakin di kembangkan, tidak hanya untuk pasok kedelai di Jawa Timur saja tetapi juga se-Indonesia atau bahkan luar negeri, Sehingga Pemerintah tidak lagi perlu membeli kedelai dari luar negeri. Dampak yang ditimbulkan tingkat produksi semakin meningkat, pendapatan daerah juga meningkat, dan kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat”. (wawancara dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2014 pukul 08.30 WIB)

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, meliputi kegiatan :
  - a. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan;
  - b. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
  - c. Pengembangan pertanian pada lahan kering;
  - d. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan;
  - e. Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan;
  - f. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian ;

Program ini berupa pelatihan langsung dalam pemanfaatan lahan oleh pemerintah, dimana bibit yang ditanamkan diperoleh dari pihak swasta. Hal ini sependapat dengan Bapak Ir. Didik sebagai Kasi Penyuluhan di Kecamatan Tegaldlimo yang mengatakan:

“Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengembangan kedelai adalah dengan membuat program-program untuk masyarakat petani, contohnya :

- a. KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) program ini berupa kredit untuk petani yang bekerja sama dengan PT.Pertani, dan didukung oleh LSM sebagai pengawas.
- b. SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu)
- c. BLBU (Bantuan Langsung Benih Unggul)”. (wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2014 pukul 8.45 WIB)

Lebih lanjut Bapak Ir. Didik sebagai Kasi Penyuluhan mengatakan “Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dalam kegiatannya berupa Pengembangan Kesuburan Lahan dengan program Optimasi Lahan, Pengembangan Kesuburan Lahan dengan Reklamasi Lahan”. Program ini berjalan seperti pada kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah, dimana

pemerintah turut ikut dalam pengembangan pertanian bersama kelompok tani dengan memanfaatkan pekarangan dan lahan kering atau kosong untuk pengembangan pangan dalam meningkatkan mutu serta produktivitas pangan di Kecamatan Tegaldlimo. Berikut gambar 13 yang dapat menunjukkan program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan yang berjalan di Kecamatan Tegaldlimo:



**Gambar 14. Pemanfaatan Pekarangan Dan Lahan Kering Atau Kosong Untuk Pengembangan Pangan Dalam Meningkatkan Mutu Serta Produktivitas Pangan Di Kecamatan Tegaldlimo**

*Sumber: Kantor Kecamatan Tegaldlimo tahun 2014*

Sedangkan kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian menurut Bapak Ir. Didik sebagai Kasi Penyuluhan mengatakan:

“Kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian adalah dengan diadakannya PAT (Perluasan Areal Tanam), jadinya yang dulunya area yang ditanami jeruk, sekarang diubah untuk ditanami kedelai, dan ada juga sebagian yang perluasan dari area hutan yg tidak terpelihara juga akan dirubah menjadi wilayah tanam kedelai di Kecamatan Tegaldlimo”. (wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2014 pukul 8.45 WIB)

- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/Perkebunan
  - a. Pengembangan pusat pusat etalase/eksibisi/promosi atas hasil produksi Pertanian/Perkebunan;
  - b. Promosi Atas hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan daerah;
  - c. Pemeliharaan Prasarana Distribusdi Hasil produksi Pertanian/Perkebunan.

Program ini dapat terimplementasi dengan sangat baik seperti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu Pameran Banyuwangi Inovatif Tahun 2013 dirangkai dengan *launching* Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!) sejak tanggal 09 November 2013 sampai tanggal 13 November 2013 di Gedung Wanita Paramita Kencana Banyuwangi. Deretan stand Perbankan Swasta dan BUMN Kabupaten Banyuwangi beserta UMKM binaan BI Jember berjajar rapi dalam gedung yang berlokasi di pusat Kota tersebut. Sementara halaman depan diramaikan oleh display promosi pariwisata, investasi, pelayanan publik serta berbagai produk UMKM binaan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Berikut Gambar 14 yang menunjukkan kegiatan selama berlangsungnya acara:



**Gambar 15. Pameran Banyuwangi Inovatif Tahun 2013**

*Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2013*

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan mempromosikan produk unggulan dari komoditas Hortikultura, Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Banyuwangi. Komoditas unggulan hortikultura berupa buah naga aman konsumsi berlabel PRIMA-3 beserta varian produk olahan jamur tiram *crispy*. Selain itu, komoditas unggulan tanaman pangan seperti beras organik serta komoditas andalan kehutanan dan perkebunan berupa madu dan kopi serta kedelai juga turut ditampilkan dalam momen tahunan tersebut. Selama pelaksanaan pameran menunjukkan respon positif masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan. Selain aktif berkonsultasi mengenai budidaya tanaman kepada perwakilan Kelompok Tani binaan serta petugas pertanian di stand, pengunjung pameran juga antusias membeli berbagai produk unggulan pertanian yang dibandrol dengan harga di

bawah harga pasar. Momen ini diharapkan dapat membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Banyuwangi dalam mengakses produk pertanian bermutu dengan harga terjangkau serta menjadi media dalam meningkatkan kesadaran untuk mengkonsumsi dan mencintai produk pertanian lokal/dalam negeri. (Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2013 <http://portal.banyuwangikab.go.id/news/detail/2514/semarak-produk-unggulan-pertanian-dalam-launching-gerakan-ekonomi-syariah-gres>)

Selain Pameran Banyuwangi Inovatif pada tahun 2013, pada tahun yang sama juga diselenggarakan sebuah kegiatan untuk mengimplementasikan program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/Perkebunan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan Pameran Produk Unggulan dan Pelayanan Publik dalam rangka peringatan HUT RI Ke 68 tahun 2013 yang digelar sejak tanggal 24 Agustus 2013 hingga tanggal 26 Agustus 2013 di sepanjang Jalan Diponegoro Banyuwangi dalam event pameran yang kegiatannya dirangkai dengan Peringatan Hari Koperasi Ke-66 tersebut. Sesuai RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi mantap mengusung tema “Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Revitalisasi Pertanian” sebagai upaya percepatan pemberdayaan menuju kemandirian dan kesejahteraan petani. Berikut gambar 15 yang menunjukkan kegiatan selama berlangsungnya acara:



**Gambar 16. Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Revitalisasi Pertanian dalam Rangka Peringatan Hut Ri Ke 68 Tahun 2013 Kabupaten Banyuwangi**

*Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2013*

Selain komoditas unggulan tanaman pangan seperti beras organik, agensi hayati, serta jagung, kedelai dan ubi kayu, komoditas andalan kehutanan dan perkebunan seperti kayu, madu, kopi, gula dan tembakau juga turut ditampilkan dalam momen tahunan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banyuwangi melakukan dialog langsung dengan kelompok tani binaan yang menampilkan komoditas pertanian hasil budidaya dengan menerapkan kaidah GAP (*Good Agricultural Practices*/Tata Cara Budidaya Tanaman yang Baik dan Benar). Selain aman untuk dikonsumsi, budidaya tanaman dengan prinsip ramah lingkungan akan menghasilkan produk pertanian dengan mutu yang lebih baik dari segi rasa, tekstur, kandungan nutrisi dan *appearance*/penampakan. Di akhir acara, Bupati Banyuwangi menyampaikan

apresiasi atas aplikasi *packaging*/pengemasan serta teknologi olahan sebagai upaya peningkatan nilai tambah (*value added*) dan harga jual komoditas pertanian.

Sebagaimana konsep yang mewarnai pelaksanaan kegiatan, pameran produk unggulan juga disertai dengan penyebarluasan informasi pertanian dalam bentuk *leaflet*, selebaran, brosur maupun layanan konsultasi sebagai bentuk pelayanan publik. Misalnya: penyebarluasan informasi mengenai budidaya sayuran dalam polybag serta pemanfaatan vertical garden dalam program intensifikasi pekarangan sebagai upaya pemenuhan gizi keluarga dan alternatif peningkatan pendapatan rumah tangga. Konsep pertanian ramah lingkungan melalui aplikasi agensi hayati dan pupuk organik sebagai upaya meminimalisasi residu kimia akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia juga menjadi prioritas dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Banyak pengunjung stand Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi selama pelaksanaan pameran menunjukkan respon positif masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan. Selain aktif berkonsultasi mengenai budidaya tanaman kepada perwakilan Kelompok Tani binaan serta petugas pertanian di stand, pengunjung pameran juga antusias membeli berbagai produk unggulan pertanian yang dijual dengan harga di bawah harga pasar. Momen ini diharapkan dapat membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Banyuwangi dalam mengakses produk pertanian bermutu dengan harga terjangkau serta menjadi media dalam meningkatkan kesadaran untuk mengkonsumsi dan mencintai produk

pertanian lokal/dalam negeri. (Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2013 <http://portal.banyuwangikab.go.id/news/detail/2261/beragam-produk-unggulan-pertanian-meriahkan-pameran-peringatan-hut-ri-ke-68>)

1) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, meliputi kegiatan :

- a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna;
- b. Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Adapaun kontribusi pemerintah dalam program peningkatan penerapan teknologi di Kecamatan Tegaldlimo, selain menerapkan penerapan teknologi dalam pengembangan kedelai maupun urusan pertanian/perkebunan di Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah juga sebagai perantara antara masyarakat dan swasta, dimana swasta yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan para petani, sedangkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan sekaligus mengawasi proses berjalannya program atau kegiatan swasta yang sedang berlangsung maupun mengevaluasinya. Dalam hal ini berarti program peningkatan penerapan teknologi di Kecamatan Tegaldlimo telah sesuai dengan apa yang telah tercantum di rencana strategis Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015. Hal ini

sesuai dengan pernyataan dari Bapak Drs. Ahmad Laini, M.Si sebagai Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi yang mengatakan:

“Kontribusi dari pemerintah untuk pengembangan kedelai bisa berperan sebagai penyuluh dengan melaksanakan tugasnya dengan bagus, bisa menyalurkan rakitan teknologi pada para petani, yang sesuai dengan PTT dan lokasi yang ada di kecamatan Tegaldlimo. tetapi tetap memperhatikan spesifikasi lokasinya. Pemerintah sebagai pengawas, pemerintah selalu melakukan monitoring, mengukur sejauhmana perkembangan-perkembangannya. Pemerintah sebagai perantara antara masyarakat dengan swasta yaitu saling menyediakan kebutuhan”. (wawancara dilakukan pada tanggal 02 Mei 2014 pukul 15.15 WIB)

Peran pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna telah diimplementasikan dengan baik, hal ini menurut pendapat tokoh masyarakat Kecamatan Tegaldlimo Bapak Widiwongso yang mengatakan:

“Pemerintah menyediakan bantuan berupa alat-alat pertanian, berupa mesin traktor untuk membajak sawah sehingga lebih cepat dalam bekerja dibanding menggunakan hewan ternak seperti sapi. Ada mesin pemotong tanaman saat panen kedelai, dan mesin penggiling hasil panen untuk memisahkan hasil panen dari tangkainya, tentunya itu sangat meringankan tenaga para petani disini. dan pemerintah juga member bantuan membangun plengsengan sawah serta sumur bor yang memudahkan petani dalam mengairi sawah utamanya jika musim kemarau tiba”. (wawancara dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2014 pukul 15.30 WIB)

Berikut gambar 16 yang menunjukkan sumur bor yang dibangun pemerintah untuk membantu pengairan di sawah, sehingga petani tidak kebingungan dalam masalah air atau memudahkan petani dalam mengairi sawah utamanya jika musim kemarau tiba:



**Gambar 17. Sumur Bor Bantuan Pemerintah dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna**

*Sumber: Peneliti*

Sedangkan untuk kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah, karena kegiatan ini tidak hanya untuk monev tanaman kedelai, tetapi monev ini dilakukan perproduk unggulan dari komoditas Hortikultura, Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan. Kegiatan monev dan pelaporan ini telah dilaksanakan pemerintah dengan baik, hal ini sesuai dengan pendapat Ali Muhtarom sebagai petani di Kecamatan Tegaldlimo yang mengatakan:

“Selain dari program-program yang dikeluarkan pemerintah. Pemerintah juga sangat berperan contohnya:

- a. Sebagai motivator, memberikan motivasi pengembangan teknologi
- b. Sebagai pengawas, mengawasi jalannya program.
- c. Memberikan sosialisasi bagaimana mengelola tanaman dengan baik agar hasil produksi maksimal”. (wawancara dilakukan pada tanggal 12 Mei 16.00 WIB)

Berikut gambar 17 yang menunjukkan salah satu kegiatan evaluasi dari produk unggulan komoditas Hortikultura:



**Gambar 18. Kegiatan Evaluasi dari Produk Unggulan Komoditas Hortikultura Tahun 2013 Kabupaten Banyuwangi**

*Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2013*

- 2) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, meliputi kegiatan :
  - a. Pengadaan sarana produksi pertanian/perkebunan;
  - b. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan ;
  - c. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan ;
  - d. Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan;

Program ini yang berperan sangat penting adalah swasta yaitu PT. Pertani, seperti dalam kegiatan pengadaan sarana produksi pertanian/Perkebunan dan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan karena pemerintah sebagai pembuat program juga memerlukan pihak swasta dalam mendukung keberhasilan program. Dan untuk kegiatan penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Peran swasta yaitu PT. Pertani juga ditugaskan dalam memberikan penyuluhan untuk meningkatkan produksi tanaman kedelai. Namun PT. Pertani hanya sebagai pihak pendukung dan penyuluhan ini tetap harus ada pemerintah yang mendampingi. Hal ini sependapat dengan pendapat Bapak Arief Gunawan, SP sebagai Kasi Operasional PT. Pertani yang mengatakan:

“Peran swasta dengan memberikan semacam alih teknologi dan pelatihan teknologi baru di bidang pertanian. Biasanya sudah dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Penyuluh Pertanian di bawah Dinas pertanian setempat menjalankan program yang di sebut SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu). Namun biasanya kami juga melakukan semacam penyuluhan dan demplot (demonstrasi ploting) yaitu kami melakukan penanaman di suatu petakan sawah dan memberikan aplikasi produk kami di mana tujuannya tentunya untuk meningkatkan hasil panen petani”. (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014 pukul 12.15 WIB)

Lebih lanjut Bapak Arief Gunawan mengatakan:

“Dalam hal ini Pengembangan Area Tanam Kedelai adalah program dari pemerintah melalui dinas pertanian. Di sini kami berperan dalam penyediaan produk untuk di aplikasikan dalam pertanaman kedelai yang tujuannya mendukung maksimalnya pertumbuhan dan hasil panen kedelai”. (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014 pukul 12.15 WIB)

Namun benih yang diberikan tidak hanya penuh atau 100% dari PT. Pertani, Pemerintah juga mengadakan benih bersubsidi untuk masyarakat

petani di Kecamatan Tegaldlimo, hal ini sesuai dengan Bapak Moch. Djamroni sebagai WIBI Tegaldlimo dan Koordinator Penyuluh yang mengatakan:

“Hal-hal yang pemerintah lakukan salah satunya adalah dengan pengadaan benih, dan pengadaan benih ini sendiri ada dua macam, ada benih yang bersubsidi dan ada juga yang gratis untuk masyarakat. Untuk harga benih ataupun pupuk yang bersubsidi tentunya lebih murah dari pada harga dipasaran”. (wawancara dilakukan pada tanggal 02 Mei 2014 pukul 10.15 WIB)

Dapat diambil kesimpulan dari berbagai pernyataan diatas, bahwa pemerintah dalam pengadaan program/kegiatan didukung oleh pihak swasta yaitu PT. Pertani, namun tidak semua produk diberikan oleh PT. Pertani karena pemerintah juga mempunyai kegiatan benih bersubsidi. Jika pemerintah memberikan benih maka yang diberikan oleh PT. Pertani adalah obat dan pupuk. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Widiwongso sebagai tokoh masyarakat Kecamatan Tegaldlimo “Kalau dari swasta kami mendapatkan bantuan berupa pupuk bersubsidi dan benih subsidi, yang kerjasama dengan pemerintah. Ada juga benih yang dibagikan secara gratis pada masyarakat petani”. (wawancara dilakukan pada tanggal 14 Mei 2014 pada pukul 15.30 WIB)

Berikut gambar 18 yang menunjukkan bantuan obat yang diberikan langsung oleh PT. Pertani:



**Gambar 19. Bantuan Obat yang Diberikan Langsung oleh PT. Pertani untuk Kelompok Tani di Kecamatan Tegaldlimo**

*Sumber: PT. Pertani*

Sedangkan gambar 19 menunjukkan benih yang diberikan kepada masyarakat petani dari pemerintah:



**Gambar 20. Bantuan Benih/Benih Bersubsidi umur 3-4 minggu yang diberikan Kepada Kelompok Tani Kecamatan Tegaldlimo oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi**

*Sumber: Kantor Kecamatan Tegaldlimo Tahun 2014*

Selain bantuan benih bersubsidi, adapun kegiatan acuan rekomendasi paket teknologi tanaman pangan di Kabupaten Banyuwangi. Acuan rekomendasi paket teknologi tanaman pangan adalah sebagai acuan penggunaan pupuk berimbang pada masing-masing tanaman. Contohnya : Kedelai,Urea 100kg. SP 36 banding 200kg. NPK 200kg +Pupuk Organik 500kg + Benih 50kg per Herktar. Jadi itulah fungsi dari Acuan Rekomendasi Paket Teknologi Tanaman Pangan Seperti pada table berikut :

**Tabel 14. Acuan Rekomendasi Paket Teknologi Tanaman Pangan di Kabupaten Banyuwangi**

No.	Komoditi	Alternatif Pemupukan	Dosis Pemupukan					Pupuk Organik	Sumber Teknologi
			Urea	SP.36	KCI	ZA	NPK		
1.	Padi Sawah	I	300	50	75	-	-	1000	
2.	Jagung		400	100	100	-	-	500	
3.	Kedelai		50	100	50	-	-	500	
4.	Kacang Tanah		50	100	50	-	-	-	
5.	Kacang Hijau		50	100	50	-	-	-	
6.	Ubi Kayu		200	50	50	-	-	-	
7.	Ubi Jalur		200	50	50	-	-	-	

No.	Komoditi	Alternatif Pemupukan	Dosis Pemupukan					Sumber Teknologi
			Urea	SP.36	KCI	ZA	NPK	
1.	Padi Sawah	II	200	-	-	-	200	1000
2.	Jagung		200	-	-	-	200	500
3.	Kedelai		50	-	-	-	150	500
4.	Kacang Tanah		50	-	-	-	200	-
5.	Kacang Hijau		50	-	-	-	200	-
6.	Ubi Kayu		100	-	-	-	200	-
7.	Ubi Jalur		100	-	-	-	200	-

*Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2013*

- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan :

- a. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh;
- b. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan.

Untuk kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pemerintah, diadakan kegiatan monitoring dimana kegiatan ini memberikan materi yang akan disampaikan kepada kelompok petani yang ada di Kabupaten Banyuwangi, namun pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai tenaga penyuluhan yang ada di Kecamatan Tegaldlimo. Berikut gambar 20 yang menunjukkan pembimbingan tenaga penyuluh dalam peningkatan kapasitas di Kecamatan Tegaldlimo.



**Gambar 21. Pembimbingan Tenaga Penyuluh dalam Peningkatan Kapasitas di Kecamatan Tegaldlimo**

*Sumber: Kantor Kecamatan Tegaldlimo Tahun 2013*

Lebih lanjut kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh tenaga penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan diimplementasikan dengan aksi program SL-PTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu), SL-PTT ini bertujuan untuk mengajarkan kepada petani cara menanam dengan baik. Dengan didukung oleh teknologi-teknologi yang telah disediakan seperti sumur bor yang telah disebutkan sebelumnya. Upaya pemerintah ini telah disebutkan tadi oleh Bapak Ir. Didik sebagai Kasi Penyuluhan di Kecamatan Tegaldlimo yang mengatakan:

“Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengembangan kedelai adalah dengan membuat program-program untuk masyarakat petani, contohnya :

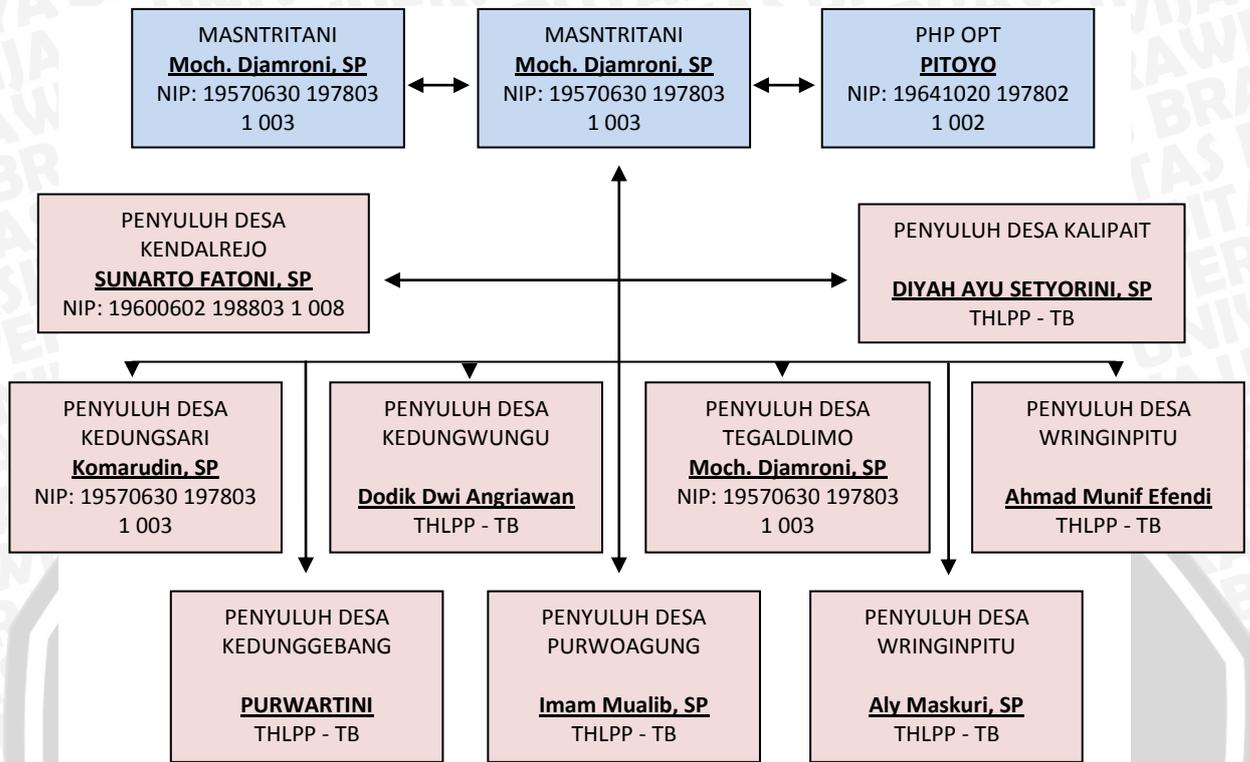
- a. KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) program ini berupa kredit untuk petani yang bekerja sama dengan PT.Pertani, dan didukung oleh LSM sebagai pengawas.
- b. SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu)
- c. BLBU (Bantuan Langsung Benih Unggul)”. (wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2014 pukul 8.45 WIB)

Bila sebelumnya telah dijelaskan tentang BLBU dari pemerintah maka upaya lainnya adalah penyuluhan yang berbentuk pelatihan dan sekolah lapang, hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Moch. Djamroni sebagai WIBI Tegaldlimo dan Koordinator Penyuluh yang mengatakan:

“Adanya penyuluhan pertanian, seperti berbentuk pelatihan dan sekolah lapang untuk para petani di Kecamatan Tegaldlimo. Kegiatan ini dilaksanakan karena adanya faktor-faktor yang kurang baik dan perlu diperbaiki, termasuk kebutuhan petani dan kebijakan pemerintah. Hal tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk rencana kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka mengubah ketrampilan, pengetahuan, sikap yang semula tidak bisa menjadi bisa, yang semula tidak mau menjadi mau”. (wawancara dilakukan pada tanggal 02 Mei 2014 pukul 10.15 WIB)

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan SL-PTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu) ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan para petani untuk mengelola pertanian/perkebunan dengan menggunakan sarana dan prasana yang telah disiapkan sebelumnya oleh pemerintah dan pihak swasta yaitu PT.Pertani yaitu berupa benih bersubsidi dari pemerintah bantuan pupuk dan obat dari pihak PT. Pertani selain itu adapula teknologi-teknologi pertanian/perkebunan yang telah dikembangkan seperti mesin pemotong tanaman saat panen kedelai, mesin penggiling hasil panen untuk memisahkan hasil panen dari tangkainya, bantuan membangun plengsengan sawah serta sumur bor yang memudahkan petani dalam mengairi sawah utamanya jika musim kemarau tiba.

Adapun struktur organisasi tenaga penyuluhan yang ada di Kecamatan Tegaldlimo yaitu sebagai berikut:



**Gambar 22. Struktur Tenaga Penyuluh dalam Peningkatan Kapasitas di Kecamatan Tegaldlimo**

*Sumber: Kantor Kecamatan Tegaldlimo Tahun 2013*

Tenaga penyuluhan ini dengan sistem:

- 1) Kerja dan kunjungan,
- 2) Penyuluhan setiap hari Rabu latihan di BPP,
- 3) Penyuluhan setiap hari kerjanya dan kunjungan ke kelompok tani.

Kerja dan kunjungan ke kelompok tani serta melakukan konsultasi ke dinas terkait, contohnya ke dinas pengairan ke kantor koperasi ke balaidesa, ke dinas kehutan. Dan pada setiap hari rabu melakukan meeting dan training di kantor bpp, disana para pll diberikan pelatihan dan rapat konsultasi oleh dinas

pertanian, kehutanan dan perkebunan kabupaten. Disamping itu setiap satu bulan sekali para penyuluh melakukan pertemuan dengan gapoktan sesuai jadwal dimasing-masing desa.

Pelaksanaannya:

- 1) Mengadakan penyuluhan dan gerakan monitoring lapangan,
- 2) Mengadakan gerakan pengendalian OPT seperti:
  - a. Karak Daun
  - b. *Xanthomonas Oryzae*
  - c. *Piricularia Oryzae*
  - d. Walang sangit
  - e. *Agromyza phaseoli* (pada tanaman muda)

Melakukan gerakan monitoring bersama, secara serentak dilakukan oleh para gapoktan yang diDampingi oleh PPL

OPT (organisme Pengganggu tanaman) dikendalikan dengan memberikan bantuan fungsida.

Pada gambar 22 menunjukkan kegiatan pembimbingan kelompok tani di Kecamatan Tegaldlimo, pembimbingan ini bertujuan untuk memberikan monitoring kepada kelompok petani untuk menambah wawasan dalam keterampilan berkebun atau bertani, bagaimana caranya agar dapat mengelola tanaman dari bibit hingga pasca panen secara lebih efektif dan efisien dengan menggunakan sarana dan prasarana yang telah disediakan pemerintah dan swasta.



**Gambar 23. Pembimbingan Kelompok Tani di Kecamatan Tegaldlimo**

*Sumber: Kantor Kecamatan Tegaldlimo Tahun 2013*

Dan pada gambar 23 ditunjukkan bagaimana berjalannya kegiatan pendampingan bagi kelompok petani yang dilakukan oleh tenaga penyuluh Kecamatan Tegaldlimo dan dari pihak swasta. Dalam kegiatan ini tenaga penyuluh melakukan monitoring terhadap tanaman kedelai yang akan di panen, hal ini bertujuan untuk memeriksa tanaman yang terkena penyakit, layak panen, ataupun dapat menyatakan gagal panen.



**Gambar 24. Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan Kelompok Tani di Kecamatan Tegaldlimo**

*Sumber: Kantor Kecamatan Tegaldlimo Tahun 2014*

Sedangkan pada gambar 24 menunjukkan hasil dari program SL-PTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu) yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan para petani untuk mengelola pertanian/perkebunan dengan menggunakan sarana dan prasana yang telah disiapkan sebelumnya. Dapat dilihat dari gambar 23 hasil tanaman kedelai yang sebelumnya telah banyak hal yang dipersiapkan untuk mengelola tanaman kedelai di Kecamatan Tegaldlimo. Masyarakat atau kelompok tani pada akhirnya dapat merasakan manfaat program SL-PTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu) yang telah diberikan masyarakat atau kelompok petani di Kecamatan Tegaldlimo. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Wartono sebagai petani di Kecamatan Tegaldlimo yang mengatakan:

“Tentu saja ada dampaknya, yang paling utama petani semakin bertambah pengetahuan, tingkat produksi juga meningkat dengan adanya kerjasama ini karena kualitas kedelai yang dihasilkan lebih

bagus dan lebih unggul. Dengan demikian Tentunya tingkat kesejahteraan masyarakat petani meningkat juga. Dan sudah pasti tingkat pendapatan masyarakat petani juga meningkat. Petani yang dahulu mengalami kesulitan dalam perekonomian sekarang lebih tercukupi, dan yang dulu kesulitan menyekolahkan anak-anaknya karena terhambat dana sekarang jadi terpenuhi semua”. (wawancara dilakukan pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 10.15 WIB)



**Gambar 25. Tanaman Kedelai Hasil SLPTT Dari Pemerintah**

*Sumber: Kantor Kecamatan Tegaldlimo Tahun 2014*

#### **4.2.3 Peran masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tegaldlimo setelah pelaksanaan PPP (*Public Privat Partnership*) dalam pengembangan kedelai berbasis LERD (*Local Economic Resource Development*)**

##### **4.2.3.1 Peran Masyarakat Kecamatan Tegaldlimo sebagai aktor yang mendukung pelaksanaan PPP (*Public Privat Partnership*)**

Peran masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah yaitu:

1. Pengaduan *online*, pengaduan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi langsung, dimana masyarakat memberikan saran dan kritikan maupun pertanyaan terhadap kinerja pemerintah, baik itu dari tenaga penyuluh yang turun langsung di lapangan maupun bantuan-bantuan yang seharusnya diberikan insentif kepada masyarakat petani. Karena tanpa melibatkan masyarakat lebih tepat disebutkan sebagai mobilisasi, dan bukan pembangunan. Oleh karena itu salah satu unsur utama dalam proses pembangunan yang harus dilakukan adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam setiap perubahan ke arah yang lebih baik dan terencana. Dalam konteks ini partisipasi merupakan salah satu bentuk yang sangat mendasar dan sekaligus mengajak seluruh komponen masyarakat bertanggungjawab dalam setiap proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai pengawasan dan evaluasi. Berikut tabel 15 yang menunjukkan bentuk pengaduan masyarakat secara *online* kepada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi:

**Tabel 15. Pengaduan Secara *Online* kepada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi**

<p><b>20-05-2014   Nama : Kelompok Tani   Alamat : Banyuwangi</b>          Para petani kesulitan mendapatkan pupuk padahal saat ini tanaman harus segera dipupuk, mohon untuk segera disalurkan pupuk ke kioskos sehingga petani tidak kebingungan.</p> <p><b>TANGGAPAN :</b>          Terimakasih atas informasinya. Penyaluran pupuk sudah dilaksanakan seoptimal mungkin sesuai Alokasi yang ada di Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta HET Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian</p>
<p><b>11-02-2014   Nama : mujiono   Alamat : Tegaldlimo</b>          Kepada Yth Bapak Bupati diwilayah kami saat sekarang ini kelangkaan pupuk ponska dan sp 36 mohon bantuan Bapak Bupati dalam tersedianya lagi pupuk tersebut karena sangat memerlukannya saat ini</p> <p><b>TANGGAPAN :</b>          Distributor pupuk Phonska dan SP-36 di Kec.Tegaldlimo adalah Sumber Hidup. Menurut keterangan distributor, penyaluran/dropping pupuk Phonska dan SP-36 di Kec.Tegaldlimo berlangsung lancar, sehingga menurut data distributor stok pupuk phonska dan SP-36 di Kec.Tegaldlimo mencukupi kebutuhan petani yang terdaftar di RDKK. Sebagai bahan evaluasi, kami mengharap informasi dari P.Mujiono mengenai desa mana saja secara lebih detail tempat dijumpainya kelangkaan pupuk sebagai bahan koordinasi ke distributor/pengecer/agen secara lebih intens.terimakasih.</p>
<p><b>31-01-2014   Nama : SOLIKIN   Alamat : banyuwangi</b>          penyuluh pertanian yang bertugas di desa kami selalu minta duit pada poktan yang mendapat bantuan apabila yang gak memberi tidak akan di beri bantuan lagi</p> <p><b>TANGGAPAN :</b>          Mohon disebutkan nama desa atau nama kelompok tani, sehingga kami dapat melakukan pembinaan terhadap oknum petugas penyuluh pertanian yang saudara sebutkan.</p>
<p><b>19-01-2014   Nama : wahyudi arif ramanda SH   Alamat : Banyuwangi</b>          Sengsaranya nasib petani di daerah wilayah lingkungan desa barurejo, dusun sumberurip dan sekitarnya disaat petani membutuhkan pupuk untuk masa pertumbuhan padi, ternyata pupuk sulit bahkan penyuluhanpenyuluhan dari dinas pertanian pun yang seharusnya membantu petani tidak ada sama sekali dimana petugaspetugas dari dinas pertanian. mohon segera di tindak lanjuti karna petani adalah sumber utama kehidupan. trims</p> <p><b>TANGGAPAN :</b>          Terimakasih atas pengaduannya, utk diketahui kouta pupuk th '14 mengalami penurunan rata2 sebesar 20% dibanding th '13, sehingga mempengaruhi penyaluran pupuk bersubsidi dilapangan. Namun dari pihak Dinas Pertanian sdh mengambil kebijakan utk melaksanakan realokasi pupuk antar kec. &amp; realokasi antar waktu shg jatah alokasi pupuk bln Pebruari &amp; Maret digeser ke bln Januari namun tetap terkendali. selanjutnya dasar penyaluran pupuk adalah RDKK dr Poktan, namun data dr Poktan belum valid, utk itu mohon dibantu penyusunan RDKK yg benar.</p>

Sumber: [http://pengaduan.banyuwangikab.go.id/index.php/pengaduan/report\\_skpd/20102/1](http://pengaduan.banyuwangikab.go.id/index.php/pengaduan/report_skpd/20102/1)

2. Pengelolaan pertanian/perkebunan, Peran masyarakat dalam pengelolaan pertanian/perkebunan ini sebagai peran kunci dalam pembangunan pertanian khususnya tanaman kedelai, masyarakat petani inilah yang melakukan semua proses dari mulai menanam hingga memanen dan seterusnya. Tanpa kehadiran atau kontribusi masyarakat maka sama artinya program-program pemerintah tidak ada hasilnya.

Sumbangan sektor pertanian terhadap pembangunan ditentukan oleh produktivitas dari sektor ini. Karena masih cukup besarnya sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian nasional, rendahnya produktivitas sektor pertanian dapat mempengaruhi produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, rendahnya produktivitas di sektor pertanian akan memperdalam kesenjangan. Keadaan itu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kestabilan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Rendahnya produktivitas sektor pertanian, selain disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang bekerja di sektor ini, juga disebabkan oleh masih besarnya proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian.

Oleh karena itu peran masyarakat dalam hal ini adalah sebagai peran utama dalam pembangunan pertanian khususnya pada bidang tanaman pangan kedelai, dimana yang telah disebutkan bahwa kedelai merupakan komoditas utama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, berikut kegiatan-kegiatan masyarakat pada pengembangan kedelai berbasis ekonomi lokalnya:

Pada gambar 25 menunjukkan petani sedang mengolah tanah untuk ditanami kedelai. Pengolahan tanah untuk budidaya kedelai sangat penting, karena kedelai harus berkecambah dengan sempurna supaya dapat berkembang dengan maksimal, selain itu benih juga memerlukan kelembapan dan oksigen yang cukup.

Ada beberapa tujuan pengolahan tanah adalah supaya tanah menjadi gembur, pembenaman sisa-sisa tanaman, memecah bongkahan-bongkahan tanah, perataan tanah dan pemberantasan rumput.



**Gambar 26. Petani Mengolah Tanah Untuk Ditanami Kedelai**

*Sumber: Kantor Kecamatan Tegaldlimo Tahun 2013*

Sedangkan gambar 26 menunjukkan masa panen kedelai dimana petani dapat memperhatikan umur panen yang tepat. Penyuluhan dari pihak pemerintah dan swasta inilah yang akhirnya diterapkan dilapangan. Karena umur panen yang tepat akan menghasilkan jumlah dan mutu produksi kedelai yang cukup tinggi. Panen terlalu awal mengakibatkan banyaknya

biji muda yang akan menjadi butir keriput dalam kondisi kering, dan kurang tahan jika disimpan. Sedangkan panen terlambat dapat menimbulkan kerusakan di lapangan seperti berkecambah, berjamur, busuk, dan berkutu serta kehilangan biji yang disebabkan polong pecah. Pada kondisi normal, panen dapat dilakukan jika kadar air biji berkisar antara 20-24%. Kedua faktor ini juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti musim, pada musim kemarau panen dapat dipercepat. Tanda tanda tanaman bisa di panen:

- a. Daun telah menguning
- b. Polong telah mengering dan berwarna coklat.
- c. Tanaman sudah matang yaitu  $\geq 90\%$
- d. Kulit polong mudah dikupas



**Gambar 27. Petani Memanen Tanaman Kedelai**

*Sumber: Kantor Kecamatan Tegaldlimo Tahun 2013*

Sedangkan Paska Panen terdapat kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan. Hasil pemotongan harus dikumpulkan secara teliti dan dipisahkan bila ada yang berbeda tingkat kematangannya. kemudian dijemur untuk menghindari kebusukan biji terutama hasil panen yang dipanen pada saat musim hujan.
- b. Pengeringan. Tujuan utama pengeringan adalah untuk menurunkan kadar air dari biji sampai batas yang aman untuk disimpan atau memudahkan pengolahan selanjutnya
- c. Perontokan biji. Tujuan dari perontokan biji adalah melepaskan biji kedelai baik dari berangkasan maupun dari polongnya.
- d. Pembersihan. Tujuannya untuk memisahkan biji kedelai dari kotoran dan biji biji yang terserang hama penyakit sreta menambah daya simpan dan meningkatkan mutu kedelai.
- e. Pewadahan dan pengangkutan. Tujuannya adalah untuk memperkecil kehilangan selama pengangkutan, pewadahan hanya bersifat sementara untuk memudahkan dalam pengangkutan saja.
- f. Penyimpanan. Tujuannya adalah mencegah kerusakan dan mempertahankan mutu biji. Tempat penyimpanana harus bersih dan bebas dari serangan hama tikus, ham bubuk dan hama gudang

#### **4.2.3.2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tegaldlimo**

Adanya program pemerintah adalah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dalam konteks ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki

program dan kegiatan yang dapat membantu masyarakat petani dalam mengelola pertanian/perkebunan. Dan pada akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Moch. Djamroni selaku WIBI Kecamatan Tegaldlimo dan koordinator penyuluh yang mengatakan:

“Adanya upaya dari pemerintah maupun masyarakat dalam pengembangan kedelai bertujuan agar peningkatan hasil produk kedelai, peningkatan pendapatan, utamanya pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah. Jika pendapatan dan luas lahan meningkat, maka masyarakat juga akan sejahtera, maka meningkatlah kesejahteraan masyarakatnya”. (wawancara dilakukan pada tanggal 02 Mei 2014 pukul 15.15 WIB)

Lebih lanjut Bapak Wartono sebagai petani di Kecamatan Tegaldlimo saat ditanyakan adakah dampak dari adanya upaya dari pemerintah maupun swasta dalam pengembangan kedelai, Bapak Wartono mengatakan:

“Tentu saja ada dampaknya, yang paling utama petani semakin bertambah pengetahuan, tingkat produksi juga meningkat dengan adanya kerjasama ini karena kualitas kedelai yang dihasilkan lebih bagus dan lebih unggul. Dengan demikian Tentunya tingkat kesejahteraan masyarakat petani meningkat juga. Dan sudah pasti tingkat pendapatan masyarakat petani juga meningkat. Petani yang dahulu mengalami kesulitan dalam perekonomian sekarang lebih tercukupi, dan yang dulu kesulitan menyekolahkan anak-anaknya karena terhambat dana sekarang jadi terpenuhi semua”. (wawancara dilakukan pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 10.15 WIB)

Sedangkan untuk mengukur kesejahteraan petani ini Bapak Moch. Djamroni sebagai WIBI Tegaldlimo dan koordinator penyuluh menjelaskan saat ditanyakan apakah hal yang ingin dicapai atau dicita-citakan pemerintah dalam pengembangan kedelai dan bagaimana cara mengukur kesejahteraan masyarakat petani, beliau mengatakan:

“Yang pertama adalah untuk meningkatkan produksi. Yang kedua, untuk mensukseskan swasembada pangan, yang ketiga meningkatkan kesejahteraan petani. Intinya Pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. Cara pemerintah mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat petani dengan cara :

- Membandingkan hasil produksi tahun kemarin dengan tahun sekarang.
- Mengukur jumlah petani dalam penduduk dari tahun kemarin dengan tahun sekarang.
- Mengukur pendapatan keseluruhan dari tahun kemarin dengan tahun sekarang.
- Jumlah Pendapatan keseluruhan dibagi jumlah penduduk per KK menjadi pendapatan perkapita, dari pendapatan perkapita tahun lalu dengan tahun sekarang nanti hasilnya itulah peningkatannya.”  
(wawancara dilakukan pada tanggal 02 Mei 2014 pukul 15.15 WIB)

Sesuai yang dikatakan Bapak Moch. Djamroni, maka akan dijabarkan cara pemerintah mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat petani, antara lain:

- Membandingkan hasil produksi tahun kemarin dengan tahun sekarang.

Berikut tabel 16 yang menunjukkan hasil produksi tanaman kedelai di Kecamatan Tegaldlimo tahun 2011-2013:

**Tabel 16. Hasil Produksi Tanaman Kedelai Tahun 2011-2013  
Kecamatan Tegaldlimo**

No.	Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kuintal/ha)
1.	2011	7.617	18,19	13.853
2.	2012	6.231	20,12	12.537
3.	2013	8.783	20,18	17.724

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Pada tabel 16 menunjukkan pada tahun 2011 luas panen kecamatan tegaldlimo mencapai 7.617 Ha tanaman kedelai dan 18,19 ton produksi

kedelai serta 13.853 kuintal/ha tanaman kedelai. Namun sempat terjadi penurunan produksi di tahun 2012 yaitu sebesar 6.231 Ha dan penurunan produktivitas tanaman kedelai sebesar 12.537 kuintal/ha, meskipun begitu produksi tanaman kedelai terjadi peningkatan yaitu sebesar 20,12 ton tanaman kedelai. Pada tahun 2013 produktivitas tanaman kedelai meningkat pesat sebesar 17.724 kuintal/ha, begitu pula dengan luas panen kecamatan tegaldlimo mencapai 8.783 Ha tanaman kedelai dan 20,18 ton produksi tanaman kedelai. Dapat disimpulkan bahwa indikator pertama tingkat kesejahteraan masyarakat petani berhasil meningkat secara signifikan meskipun mengalami penurunan di tahun 2012.

- b. Mengukur jumlah petani dalam penduduk dari tahun kemarin dengan tahun sekarang.

Sebagian besar penduduk Kecamatan Tegaldlimo bekerja di bidang pertanian, hal ini dapat dilihat pada tabel 17 yang menunjukkan jumlah penduduk yang berkerja di bidang pertanian di Kecamatan Tegaldlimo tahun 2011-2012 menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi tahun 2013:

**Tabel 17. Jumlah Penduduk yang Berkerja di Bidang Pertanian di Kecamatan Tegaldlimo Tahun 2011-2012**

No.	Kelurahan/Desa	Tahun 2011	Tahun 2012
1.	Purwosari	1.309	3.419
2.	Kendalrejo	1.369	2.529
3.	Kedungsari	2.140	4.801
4.	Kedungwungu	2.134	4.974
5.	Tegaldlimo	2.039	2.432
6.	Wringipitu	2.035	2.489
7.	Kedunggebang	2.650	4.296
8.	Purwoagung	1.046	1.999
9.	Kalipait	1.779	1.288
<b>TOTAL</b>		<b>16.519</b>	<b>28.227</b>

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi tahun 2013

Ditunjukkan dalam tabel 17 pada tahun 2011 jumlah penduduk yang berkerja di bidang pertanian di Kecamatan Tegaldlimo sebesar 16.519 orang sedangkan tahun 2012 meningkat pesat sebesar 28.227 orang. Dapat disimpulkan bahwa penduduk yang bekerja sebagai petani meningkat, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Tegaldlimo memilih bekerja sebagai petani. Jadi dapat dikatakan bahwa pendapatan di bidang pertanian bias mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Tegaldlimo.

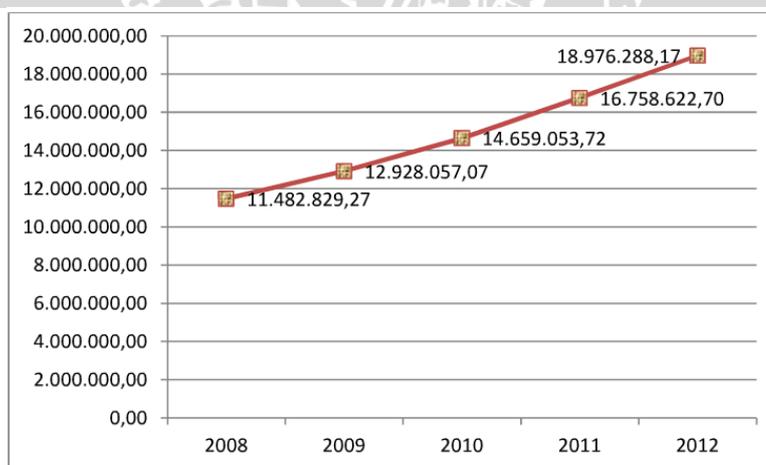
- c. Mengukur pendapatan keseluruhan dari tahun kemarin dengan tahun sekarang.

Berikut tabel 18 dan grafik 26 yang menunjukkan peningkatan pendapatan per-kapita di Kabupaten Banyuwangi tahun 2008-2012:

**Tabel 18. Pendapatan Per-Kapita di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008-2012**

No	T a h u n	Pendapatan Per Kapita (Rp)
1.	2008	11,482,829.27
2.	2009	12,928,057.07
3.	2010	14,659,053.72
4.	2011	16,758,622.70
5.	2012	18,976,288.17

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi tahun 2013



**Gambar 28. Grafik Pendapatan Per-Kapita di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008-2012**

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi tahun 2013

Ditunjukkan pada grafik pendapatan perkapita Kabupaten Banyuwangi,

- Tahun 2008 menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 11.482.829,27.
- Tahun 2009 menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 12.928.057,07.
- Tahun 2010 menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 14.659.053,72.
- Tahun 2011 menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 16.758.622,70.
- Dan tahun 2012 menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 18.976.288,17.

Dari pendapatan ini sebagian besar didapatkan dari sektor pertanian.

Hal ini dilihat pada tabel 19 yang menunjukkan tingkat inflasi sektoral Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012:

**Tabel 19. Tingkat Inflasi Sektoral Kabupaten Banyuwangi Pada Tahun 2012**

No	Sektor	Inflasi
1	Pertanian	9,87
2	Pertambangan & Penggalian	6,02
3	Industri Pengolahan	8,41
4	Listrik, Gas dan Air bersih	4,30
5	Bangunan/konstruksi	6,98
6	Perdagangan, hotel dan Restoran	9,54
7	Pengangkutan dan Komunikasi	6,04
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,43
9	Jasa – jasa	6,33
Tingkat Inflasi Umum		6,24

*Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi tahun 2013*

Bila diamati dari prosentase untuk seluruh sektor ekonomi, terlihat positif atau terjadi inflasi, artinya tahun 2012 terjadi kenaikan harga untuk semua sektor ekonomi. Inflasi tertinggi terjadi pada sektor pertanian

khususnya tanaman bahan makanan yang artinya termasuk tanaman kedelai di Kecamatan Tegaldlimo. Sektor pertanian yang memberikan kontribusi paling besar daripada sektor lainnya yaitu sebesar 9,87%.

- d. Jumlah Pendapatan keseluruhan dibagi jumlah penduduk per KK menjadi pendapatan perkapita, dari pendapatan perkapita tahun lalu dengan tahun sekarang.



### **4.3. Analisis Data**

#### **4.3.1 Pengembangan LERD (Local Economic Resource Development) dalam Bidang Pertanian Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi**

##### **4.3.1.1 Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang Dipengaruhi oleh Sektor Pertanian**

Seperti yang telah diketahui pada pembahasan sebelumnya, bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu lumbung pangan nasional di Jawa Timur yang memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi produksi pangan nasional. Salah satu komoditas andalannya adalah kedelai, karena kedelai Banyuwangi memberikan kontribusi sebesar 17,28 % terhadap produksi kedelai Jawa Timur dan merupakan Kabupaten terbesar produsen kedelai di Jawa Timur. Sedangkan produksi kedelai Jawa Timur memberikan kontribusi sebesar 42,51 % terhadap produksi kedelai Nasional sekaligus merupakan Provinsi penghasil kedelai terbesar di Indonesia.

Kabupaten Banyuwangi sebagai penghasil kedelai terbesar di Jawa Timur produksinya mencapai rata rata 66.094 ton dengan produktivitas rata rata mencapai 19,68 ku per ha. Produktivitas tersebut merupakan produktivitas tertinggi di Indonesia. Sebagai pembanding provitas kedelai Nasional adalah 13,75 ku per ha, sedangkan provitas kedelai Jawa Timur mencapai 15,45 ku per ha. Luas pertanaman kedelai di Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya rata rata mencapai 36.068 ha.

Pertumbuhan atau pengembangan kedelai ini secara tidak langsung telah menyumbangkan pembangunan kepada daerahnya yang menurut Afiffuddin (2010:42) administrasi pembangunan adalah proses kerjasama yang sudah terencana untuk mencapai pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan untuk menuju modernisasi. Administrasi pembangunan pada hakekatnya adalah administrasi publik yang mendukung usaha-usaha dalam memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan. Menurut George F. Gant dalam Hardjanto (2008) menjelaskan bahwa:

“Administrasi pembangunan itu merupakan penyempurnaan birokrasi (aparatur pemerintah) untuk menghadapi meningkatkan jumlah, jenis dan kompleksitas fungsi-fungsi pemerintah guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Dimana administrasi pembangunan dalam administrasi publik adalah sebagai penyempurnaan dari administrasi publik itu sendiri”.

Pembangunan ini ditandai dengan beberapa indikator. Angka Pertumbuhan Ekonomi sering digunakan sebagai salah satu indikator penting dalam mengkaji kinerja ekonomi suatu daerah, apabila semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan semakin baik kinerja ekonomi daerah tersebut.

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikaor makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Deddy T. Tikson (dalam Badruddin, 2009) yang mengatakan bahwa:

“Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah

dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi)”.

Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Banyuwangi masih sangat besar. Rata-rata masih sekitar 50% setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, PDRB atau yang disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun). PDRB merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Sesuai data perekonomian Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2006-2010, Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dapat

dilihat kembali dari data yang telah di uraikan pada pembahasan sebelumnya, dimana kondisi ekonomi Kabupaten Banyuwangi mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahunnya sejak tahun 2006 yaitu sebesar 4,74 %. Kondisi ini terus meningkat pada tahun 2006–2010, pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi sebesar 6,22 %. Hal ini dapat dilihat pada besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) tahun 2010 mencapai 11.099.055,81 juta rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 10.439.329,31 juta rupiah. Sedangkan angka pendapatan per kapita kabupaten Banyuwangi tahun 2010 sebesar Rp. 6.101.969,78, hal ini menunjukkan peningkatan yang sebelumnya menunjukkan angka sebesar Rp. 5.101.969,78.

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Hal ini sependapat dengan Deddy T. Tikson (dalam Badruddin, 2009) yang mengatakan:

“Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun, begitupula sebaliknya”.

Sedangkan tingkat Inflasi di Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 sebesar 6,22%. Laju Inflasi di Kabupaten Banyuwangi terkategori pada tingkat inflasi ringan yaitu dibawah 10%, yang diharapkan akan memberi dampak positif pada

perekonomian Kabupaten Banyuwangi yaitu mendorong perekonomian lebih baik, membuat orang lebih giat untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Laju Inflasi di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan adanya peningkatan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa di Kabupaten Banyuwangi tingkat Inflasi pada tahun 2010 sebesar 6,22% yang dalam hal ini tingkat inflasi meningkat. Namun meskipun demikian laju Inflasi di Kabupaten Banyuwangi terkategori pada tingkat inflasi ringan yaitu dibawah 10%.

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap pembangunan daerah juga memerlukan pemerintah daerah yang secara aktif melakukan perencanaan pembangunan di daerahnya untuk menjaga stabilitas ekonomi, dan agar pemerintah tetap mempertahankan laju inflasi dibawah kategori sedang yaitu kategori rendah, karena pemerintah yang berwenang langsung atas segala program dan kebijakannya, meskipun pelaksanaanya didukung atau dilakukan oleh pihak-pihak yang selain pemerintah. Pihak-pihak ini adalah terkait atau yang memiliki kepentingan didalamnya. Hal ini sependapat dengan Sukirno (1976:116) yang mengatakan bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam pembangunan di daerah hal ini didorong oleh beberapa manfaat, antara lain:

- a. Membantu pemerintah pusat dalam pembangunan dan mengambil peran lebih besar tentang proyek pembangunan di daerahnya;
- b. Perencanaan pembangunan daerah menciptakan desentralisasi yang efektif dan menciptakan administrasi yang lebih efisien terutama dikarenakan pemerintah daerah memiliki pemahaman dan kedekatan yang lebih terhadap daerahnya sendiri;
- c. Memberikan rangsangan dan pengarahan kepada sektor swasta sehingga kegiatan investasi bisa berjalan efisien dan memberikan sumbangan yang optimal kepada perekonomian.

Hampir separuh dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Banyuwangi bergerak di bidang Pertanian dengan luas tanah persawahan sekitar 66.152 Ha atau sekitar 11,44% sehingga mempunyai pengaruh terhadap struktur ekonomi sebesar 45,15%. Sektor unggulan dari bidang pertanian salah satunya adalah kedelai. Kabupaten Banyuwangi sebagai penghasil kedelai terbesar di Jawa Timur. Bila dibandingkan dengan produksi kedelai tingkat nasional maka Kabupaten Banyuwangi berada diatas rata-rata nasional. Produktifitas kedelai Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 sebesar 1,8 ton per hektar melampaui

rata-rata produktifitas nasional yang hanya 1,36 ton per hektar. Pada tahun 2012 produktifitas kedelai nasional meningkat menjadi 1,37 ton per hektar tetapi juga masih jauh di bawah Banyuwangi yang mencapai 2,1 ton per hektar.

#### **4.3.1.2 Kondisi Komoditas Tanaman Kedelai Berbasis LERD (Local Economic Resource Development) di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi**

Sentra kedelai di Kabupaten Banyuwangi salah satunya berada di Kecamatan Tegaldlimo karena produktivitas/hasil produksi yang dihasilkan oleh kecamatan ini dapat mencukupi kebutuhan komoditas dan pangan nasional setiap tahunnya. Sesuai yang telah disebutkan bahwa Kecamatan Tegaldlimo merupakan penghasil terbesar tanaman kedelai yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi. Dimana menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 Kecamatan Tegaldlimo menunjukkan produktivitas tanaman kedelai sebesar 13.853 ton pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 menunjukkan produktivitas 12.537 ton, sedangkan pada tahun 2013 menunjukkan 17.724.

Namun meskipun begitu tingginya produktivitas tanaman kedelai yang dihasilkan oleh Kecamatan Tegaldlimo, kemakmuran hasilnya hanya dapat dirasakan oleh yang memiliki ladang pertanian luas. Sedangkan petani yang tidak memiliki lahan hanya dapat merasakan apabila masa panen tiba. Selain itu adapun permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Banyuwangi sebagai penghasil kedelai terbesar di Jawa Timur, pada tahun 2010 produksi tanaman kedelai dapat

mencapai 64.857 ton, dan pada tahun 2011 produksinya mencapai 66.094 ton, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 53.648 ton.

Dapat disimpulkan, meskipun pada tahun 2011 terjadi peningkatan namu pada tahun berikutnya yakni tahun 2012 produksi tanaman kedelai di Kecamatan Tegaldlimo mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 13.256 ton. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 terjadinya penurunan areal tanam kedelai adalah harga kedelai yang tidak berpihak pada petani, sehingga petani beralih ke tanam jagung atau jeruk yang jauh lebih menguntungkan.

Kementerian Pertanian (2009), mengemukakan persoalan mendasar yang dihadapi sektor pertanian pada saat ini dan di masa yang akan datang dalam upaya mencapai tujuan pembangunan pertanian, yaitu :

“(1) dampak perubahan iklim global terhadap penurunan produksi pertanian, (2) terbatasnya infrastruktur, sarana prasarana, air, dan lahan pertanian, (3) lemahnya status dan kecilnya luas penguasaan lahan serta tekanan degradasi dan alih fungsi lahan, (4) sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal, (5) terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan, (6) lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh, (7) masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi, (8) belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik, (9) rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP), (10) tekanan globalisasi pasar dan liberalisasi perdagangan, (11) kuantitas dan kualitas produk pertanian belum mendukung berkembangnya agroindustri, (12) minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun, (13) belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian, (14) kebijakan fiskal dan moneter belum mendukung berkembangnya usaha pertanian, dan (15) kurangnya optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian”.

Adapun perencanaan pembangunan pertanian di Indonesia yang harus diterapkan di Kabupaten Banyuwangi khususnya pada Kecamatan Tegaldlimo. Menurut Kementerian Pertanian menjelaskan target pembangunan bidang pertanian yang bertujuan untuk mencapai 4 (empat) target utama, yaitu

- (1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan
- (2) Peningkatan diversifikasi pangan
- (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor komoditi pertanian, serta
- (4) Peningkatan kesejahteraan petani.

Salah satu target utama pembangunan pertanian adalah peningkatan kesejahteraan petani yang tercermin dari meningkatnya pendapatan petani, berkurangnya penduduk miskin, berkurangnya masyarakat kekurangan pangan, dan turunnya ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Untuk mengatasi hal ini maka pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta untuk mempertahankan komoditas utamanya yaitu kedelai untuk tetap mempertahankan produksinya setiap tahun untuk terus meningkat. Karena bidang pertanian di Kabupaten Banyuwangi yang memberikan kontribusi terbesar dalam memberikan pemasukan atau pendapatan daerah di Kabupaten Banyuwangi.

#### **4.3.2 Pelaksanaan PPP (*Public Privat Partnership*) dalam pengembangan kedelai di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi berbasis LERD (*Local Economic Resource Development*)**

##### **4.3.2.1 Proses terjadinya PPP (*Public Privat Partnership*) di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi**

Sejalan dengan bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah di tanah air, setiap pemerintah kabupaten dan kota melakukan berbagai pembenahan menuju kearah terselenggaranya otonomi di masing-masing daerah kabupaten dan kota. Hal yang sangat penting menjawab berbagai isu dalam implementasi otonomi daerah

tersebut adalah tersedianya sistem dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah. Pemberian otonomi kepada daerah menurut Bratakusumah dan Riyadi (2003) merupakan “upaya pemberdayaan dalam rangka mengelolah pembangunan di daerahnya. Kreativitas, inovasi dan kemandirianlah diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat”. Hal penting lain adalah dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkatkan, dengan kata lain penyediaan barang-barang publik (*public goods*) dan pelayanan publik (*public service*) dapat lebih terjamin.

Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal erat kaitannya dengan pemberdayaan sumberdaya manusianya, lembaganya dan lingkungan sekitarnya. Untuk mengembangkan sumberdaya ekonomi lokal tidak cukup hanya dengan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusianya, tetapi juga diperlukan adanya lembaga yang terlatih untuk mengelola sumberdaya manusia yang sudah maju, dan memerlukan lingkungan yang kondusif untuk memungkinkan lembaga ekonomi lokal tersebut berkembang. Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal melalui pengembangan lembaga kemitraan semua *stakeholders* (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dengan demikian membutuhkan kemampuan komunikasi diantara semua lembaga yang bersangkutan yang menjamin kesinambungan mitra kerja dan mitra usaha.

Peran pemerintah sebagai aktor tunggal dalam pembangunan daerah tidak dapat memecahkan masalah dalam pembangunan daerah pedesaan, sehingga membutuhkan peran dari sektor swasta yang memiliki kemampuan dan

memberikan dukungan dalam pembangunan daerah pedesaan. Dengan ini maka dibutuhkan adanya Tahapan awal yang harus dilakukan dalam kemitraan, meliputi: memulai, merencanakan, pelaksanaan, mengamati, mengendalikan, dan mengevaluasi. Dengan demikian para aktor akan dengan mudah menjalankan PPP (*Public Privat Partnership*).

Namun peran pemerintah sebagai aktor tunggal dalam pembangunan daerah tidak dapat memecahkan masalah dalam pembangunan daerah, sehingga membutuhkan peran dari sektor swasta yang memiliki kemampuan dan memberikan dukungan dalam pembangunan daerah. Dengan ini maka dibutuhkan adanya tahapan awal yang harus dilakukan dalam kemitraan, meliputi: memulai, merencanakan, pelaksanaan, mengamati, mengendalikan, dan mengevaluasi. Karena dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal melalui pengembangan lembaga kemitraan semua *stakeholders* (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dengan demikian membutuhkan kemampuan komunikasi diantara semua lembaga yang bersangkutan yang menjamin kesinambungan mitra kerja dan mitra usaha.

Kemitraan dapat dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan menjadi pasangan, jodoh, atau sekutu. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Dari sini kemitraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004: 129).

Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, maka kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Ada dua pihak atau lebih; (2) Memiliki visi dalam mencapai tujuan; (3) Ada kesepakatan; (4) Saling membutuhkan.

Menurut Sulistiyani (2004:129) adapun tujuan dari suatu kemitraan, yaitu:

“Tujuan suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Kemitraan dapat dilakukan dengan perseorangan, badan hukum, maupun kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara atau *subordinate*, dapat memiliki visi yang berbeda, tetapi secara fungsional saling melengkapi”. (Sulistiyani, 2004:129)

Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal erat kaitannya dengan pemberdayaan sumberdaya manusianya, sumberdaya manusia yang dimaksud adalah aktor-aktor penting dalam sebuah pembangunan atau yang dinamakan *stakeholders* (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat). *Stakeholder* inilah yang nantinya berperan dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal melalui pengembangan lembaga kemitraan dimana dalam prosesnya dibutuhkan kemampuan komunikasi diantara semua lembaga yang bersangkutan demi menjamin kesinambungan mitra kerja dan mitra usaha. Dengan ini maka dibutuhkan adanya Tahapan awal yang harus dilakukan dalam kemitraan, meliputi: memulai, merencanakan, pelaksanaan, mengamati, mengendalikan, dan mengevaluasi. Dengan demikian para aktor akan dengan mudah menjalankan PPP (*Public Privat Partnership*).

Peran Pemerintah yang berwenang atau bertanggung jawab atas permasalahan dibidang pertanian di Kabupaten Banyuwangi adalah Dinas Pertanian, Kehutanan

dan Perkebunan dengan didampingi oleh pihak swasta dan peran serta masyarakat. Pihak swasta yang membantu Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi adalah PT. Pertani. Sedangkan yang dimaksud masyarakat adalah warga dari kelompok tani di Kecamatan Tegaldlimo.

Dengan adanya ketiga sektor penting ini, maka pelaksanaan PPP (*Public Privat Partnership*) akan berjalan dengan baik. PT. Pertani mempunyai tugas dalam meningkatkan produktivitas di bidang pertanian khususnya untuk tanaman kedelai di Kecamatan Tegaldlimo dengan berkontribusi dalam pemberian pupuk dan bantuan lainnya yang akan dibahas dalam Program-program yang dilaksanakan dalam pelaksanaan PPP (*Public Privat Partnership*) di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

PPP (*Public Privat Partnership*) di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi telah ada sejak tahun 2007. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berkerjasama dengan pihak swasta yaitu PT. Pertani. Kerjasama berupa pengadaan pupuk yang berkualitas baik, dan memberikan subsidi pada pupuk yang dijual pada masyarakat. Dan secara khususnya, pemerintah melakukan perbanyakan benih, dan kualitas benih yang unggul. Karena di Kabupaten Banyuwangi sendiri Pengadaan Benih ini hanya dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu saja, dan salah satunya di Kecamatan Tegaldlimo ini, hal ini karena Kecamatan Tegaldlimo merupakan salah satu sentra kedelai terbesar di Kabupaten Banyuwangi.

Diadakannya kerjasama ini, karena untuk menopang kebutuhan pengembangan kedelai salah satunya adalah dengan adanya kerjasama ini, tidak adanya penyedia benih dan pupuk yang baik selain pihak swasta. Dengan adanya

*kerjasama ini maka pemerintah dalam upayanya untuk meningkatkan hasil produknya, peningkatan pendapatan, utamanya pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah akan tercapai begitupula dengan kesejahteraan masyarakat.*

Dengan adanya kemitraan ini maka proses PPP (*Public Privat Partnership*) dikatakan berhasil dalam pengembangan kedelai berbasis LERD di Kecamatan Tegaldlimo. Hal ini dikarenakan karakteristik dari PPP adalah kemitraan yang didalamnya terdapat *sharing* antara pemerintah dan swasta dalam bentuk investasi, resiko, tanggung jawab dan *reward*. Kemitraan tersebut tidak dibangun pada aturan dan pola tanggung jawab yang seragam, namun biasanya bervariasi antara proyek yang satu dengan yang lain. Konsep PPP dapat pula tidak hanya dipandang dari sisi *public* dan *private sector* saja. Menurut UNDP pelaku PPP dapat dikembangkan menjadi 3 unsur yaitu (Hardijanto, 2000):

- 1) Negara, berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Dalam penelitian ini berarti Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi.
- 2) Swasta, mendorong terciptanya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Dalam penelitian ini berarti PT. Pertani.
- 3) Masyarakat, memwadahi interaksi sosial politik, memobilisasi kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi sosial dan politik. Dalam penelitian ini berarti masyarakat Kecamatan Tegaldlimo.

Konsep ini juga dikenal sebagai *triangle synergi* antara *government*, *business* dan *communities*. Menurut William (2006) dari *USAID Environmental Services Program*, definisi PPP adalah:

*”an agreement or contract, between a public entity and a private party, under which : (a) private party undertakes government function for specified period of time, (b) the private party receives compensation for performing the function, directly or indirectly, (c) the private party is liable for the risks arising from performing the function and, (d) the public facilities, land or other resources may be transferred or made available to the private party.”*

Maksudnya adalah Perjanjian atau kontrak, antara badan publik dan swasta partai, di mana: (a) pihak swasta melakukan fungsi pemerintah untuk periode tertentu waktu, (b) pihak swasta menerima kompensasi untuk melakukan fungsi, langsung maupun tidak langsung (c) pihak swasta bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari melakukan fungsi dan, (d) fasilitas umum, tanah atau sumber daya lainnya dapat ditransfer atau tersedia untuk pihak swasta.

Sedangkan dalam Perpres Nomor 67 Tahun 2005 dijelaskan bahwa tujuan pelaksanaan PPP adalah untuk :

- a) Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan melalui pengalihan dana swasta;
- b) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;
- c) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan infrastruktur serta
- d) Mendorong dipakainya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan daya beli pengguna.

Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan hasil penelitian di lapangan, maka pelaksanaan PPP di Kecamatan Tegaldlimo telah berjalan dengan baik. Karena apabila di analisis kembali pada data yang diperoleh dari lapangan, poin a dan poin b dalam Perpres Nomor 67 Tahun 2005 telah sesuai dan telah dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Moch. Djamroni selaku WIBI Kecamatan Tegaldlimo serta koordinator penyuluh pada penyajian data sebelumnya yang mengatakan:

“Diadakannya kerjasama ini, karena untuk menopang kebutuhan pengembangan kedelai salah satunya adalah dengan adanya kerjasama ini, tidak adanya penyedia benih dan pupuk yang baik selain pihak swasta ini. *Kan* jika Benih diambil dari produk yang bagus, pupuk yang bagus, dan harga lebih murah dari harga pasar maka petani juga akan tidak terlalu berat untuk membeli. Begitu juga hasil panennya pasti juga akan lebih

bagus dan unggul. Dan yang di dapatkan oleh pemerintah juga banyak, adanya upaya dalam peningkatan hasil produknnya, peningkatan pendapatan, utamanya pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah, jika pendapatan dan luas lahan meningkat, maka masyarakat juga akan sejahtera, maka meningkatlah kesejahteraan masyarakatnya”. (wawancara dilakukan pada tanggal 02 Mei 2014 pukul 15.15 WIB)

Sedangkan poin c telah dilaksanakan, hal ini sesuai dengan pendapat tokoh masyarakat Kecamatan Tegaldlimo Bapak Widiwongso yang mengatakan:

“Pemerintah menyediakan bantuan berupa alat-alat pertanian, berupa mesin traktor untuk membajak sawah sehingga lebih cepat dalam bekerja disbanding menggunakan hewan ternak seperti sapi. Ada mesin pemotong tamanan saat panen kedelai, dan mesin penggiling hasil panen untuk memisahkan hasil panen dari tangkainya, tentunya itu sangat meringankan tenaga para petani disini. dan pemerintah juga member bantuan membangun plengsengan sawah serta sumur bor yang memudahkan petani dalam mengairi sawah utamanya jika musim kemarau tiba”. (wawancara dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2014 pukul 15.30 WIB)

Dan poin d juga telah terlaksana dengan adanya subsidi benih bagi para petani, hal ini sesuai dengan Bapak Moch.Djamroni sebagai WIBI Tegaldlimo dan Koordinator Penyuluh yang mengatakan:

“Hal-hal yang pemerintah lakukan salah satunya adalah dengan pengadaan benih, dan pengadaan benih ini sendiri ada dua macam, ada benih yang bersubsidi dan ada juga yang gratis untuk masyarakat. untuk harga benih ataupun pupuk yang bersubsidi tentunya lebih murah dari pada harga dipasaran”. (wawancara dilakukan pada tanggal 02 Mei 2014 pukul 10.15 WIB)

Pertimbangan perlunya memperkuat kerjasama pemerintah dan swasta yang dilihat dari 3 (tiga) dimensi sebagai berikut (Tri Widodo, 2004) :

- 1) Alasan politis: menciptakan pemerintah yang demokratis dan mendorong perwujudan *good governance and good society*
- 2) Alasan administratif : adanya keterbatasan sumber daya pemerintah, baik sumber daya anggran, SDM, asset, maupun kemampuan manaje-men.
- 3) Alasan ekonomis: mengurangi kesenjangan atau ketimpangan, memacu pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kontinuitas, serta mengurangi resiko.

PPP adalah cara mengkolaborasikan peran untuk memperoleh manfaat bersama. Keuntungan yang dapat diperoleh dari PPP adalah inovasi; kemudahan pembiayaan; ilmu teknologi; efisiensi; semangat entrepreneurship; yang dikombinasikan dengan tanggung jawab sosial; kepedulian pada lingkungan; pengetahuan dan budaya lokal. Pada dasarnya, PPP memiliki tiga karakteristik, yaitu memiliki perjanjian kontrak yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing; menanggung resiko bersama; timbal balik finansial kepada swasta sepadan dengan pencapaian yang diinginkan pemerintah. Dalam merancang PPP, sangat penting untuk memperhatikan tujuan bersama, batasan lingkup hukum/peraturan, kerangka institusi, kebutuhan finansial dan sumberdaya, serta kepentingan *stakeholders*. (Tri Widodo, 2004)

Dapat disimpulkan bahwa kerjasama di Kecamatan Tegaldlimo telah berlangsung hampir tujuh tahun, dimana setiap *stakeholder* yang terkait dan memiliki fungsinya masing-masing telah melaksanakan sebuah kerjasama yang baik. Hal ini dapat dilihat dari peran pemerintah yaitu Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi berharap kerjasama dengan pihak swasta ini agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh petani seperti mahalnya harga pupuk dan benih kedelai. Selain itu Pemerintah juga secara rutin memberikan sekolah lapang (SLPTT) dan penyuluhan kepada para petani, upaya ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para petani tentang cara menanam kedelai yang baik sehingga dapat menghasilkan kedelai yang berkualitas baik. Sedangkan peran swasta disini memberikan pupuk, benih serta

obat kepada petani dengan harga murah dan kualitas yang baik, selain itu pihak swasta juga ikut dalam memberikan penyuluhan kepada para petani dalam memberikan cara bagaimana menanam kedelai dengan baik. Dan masyarakat yaitu petani di Kecamatan Tegaldlimo sebagai aktor utama dalam mengelola sumberdaya ekonomi lokalnya yaitu tanaman kedelai.

Dari dasar inilah *Public Privat Partnership* diperlukan dalam penerapan LERD pada Kecamatan Tegaldlimo dalam meningkatkan produktivitas tanaman kedelai agar tetap menjadi produksi terbesar nasional, selain itu *Public Privat Partnership* diharapkan mampu memberikan kesejahteraan masyarakat kelompok tani. Sesuai Perpres Nomor 67 Tahun 2005 dinyatakan bahwa pelaksanaan PPP dilakukan diantaranya berdasarkan prinsip: adil, terbuka, transparan, dan bersaing (*competition*). Dengan adanya pengadaan yang mengedepankan *transparency and competition*, manfaat yang dapat diraih adalah :

- 1) Terjaminnya mendapatkan harga pasar yang terendah (*lowest market prices*);
- 2) Meningkatkan penerimaan publik terhadap proyek PPP;
- 3) Mendorong kesanggupan lembaga keuangan untuk menyediakan pembiayaan tanpa *sovereign guarantees*;
- 4) Mengurangi risiko kegagalan proyek;
- 5) Dapat membantu tertariknya *bidders* yang sangat berpengalaman dan berkualitas tinggi;
- 6) Mencegah aparat pemerintah dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Dapat disimpulkan bahwa administrasi publik dalam pengembangan kedelai berbasis LERD telah berhasil menunjukkan fungsi dari administrasi publik itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi publik menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro dalam Indradi (2008:12) yang menyebutkan bahwa:

- a. Usaha kelompok bersifat kooperatif yang diselenggarakan dalam satu lingkungan publik;

- b. Meliputi seluruh tiga cabang pemerintahan: eksekutif, yudikatif, legislatif, serta pertalian diantara ketiganya;
- c. Mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijakan publik (*public policy*) dan merupakan bagian proses politik;
- d. Amat berbeda dengan administrasi privat;
- e. Berhubungan erat dengan kelompok-kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

#### **4.3.2.2 Program-Program yang dilaksanakan dalam Pelaksanaan PPP antara Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangidan PT. Pertani Sebagai Pihak Swasta dalam Pengembangan Kedelai Berbasis LERD di Kecamatan Tegaldlimo**

Melalui otonomi daerah, setiap daerah di Indonesia dituntut untuk dapat mengembangkan setiap potensi lokal yang dimilikinya agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan regional maupun global. Karena dalam otonomi daerah, berarti pemerintah harus berusaha untung mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi lokalnya, karena dengan begitu maka masyarakat juga ikut terlibat didalamnya dimana masyarakat sebagai peran utama dalam keberhasilan program pemerintah untuk dapat meningkatkan ekonomi daerah maupun untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dan dalam pembangunan daerahnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam penyediaan barang dan jasa, hal ini karena pemerintah memiliki keterbatasan dalam memproduksi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat seperti pupuk dan obat. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi pembangunan menurut Afiffuddin (2010:42) yang mengatakan bahwa “administrasi pembangunan merupakan proses kerjasama yang sudah terencana untuk mencapai pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan untuk menuju modernisasi”.

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian dalam Tjokroamidjojo (1995:9-10) menjelaskan lebih lanjut tentang beberapa ciri administrasi pembangunan :

- a. Lebih memberikan perhatian pada lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara baru berkembang.
- b. Administrasi pembangunan memiliki peran aktif dan kepentingan (*committed*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaannya yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, ekonomi dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik.
- c. Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (inovasi) ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk masyarakat di masa depan.
- d. Lebih berorientasi kepada pembangunan (*development functions*) dari pemerintah. Dalam hal ini adalah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif seperti telah disebutkan terdahulu. Yang terakhir juga dapat disebutkan sebagai kemampuan dan pengendalian. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai *development agent*.
- e. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Dengan kata lain, administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program pembangunan.
- f. Dalam administrasi pembangunan administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*change agents*).
- g. Lebih berpendekatan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa administrasi pembangunan memiliki peran aktif dan kepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaannya yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, ekonomi dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik.

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan suatu daerah sebaiknya lebih mengarah pada pendekatan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya lokal yang merupakan faktor-faktor endogen wilayah tersebut secara optimal. Karena apabila sumber daya local ini dikelola dengan baik maka akan mendatangkan hasil yang diharapkan dari setiap program pemerintah. Penekanan pada pengembangan potensi lokal inilah yang membawa pembahasan penelitian ini menuju ke konsep pengembangan ekonomi lokal. Adapun Pengembangan Ekonomi Lokal sendiri pada prinsipnya merupakan:

“Suatu proses ketika aktor-aktor di dalam komunitas, baik kota, wilayah regional maupun kota-kota besar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat bekerjasama secara kolektif untuk menciptakan kondisi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan generasi yang lebih baik. Melalui proses ini diciptakan dan dikembangkan suatu budaya kewirausahaan yang dinamis, serta kesejahteraan komunitas dan usaha dalam rangka meningkatkan kualitas hidup bagi semua yang berada dalam komunitas” (World Bank, 2001).

Beberapa hal penting dalam upaya pengembangan ekonomi lokal adalah bagaimana menjadikan produk ekonomi yang ada di suatu wilayah agar supaya memiliki nilai jual, mampu bersaing dengan wilayah lain dan memiliki jaringan pemasaran yang baik. Permasalahannya adalah bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh masing-masing daerah sehingga dapat mencapai hal tersebut. Untuk menunjang pembangunan pertanian dan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut sangat dibutuhkan konsep LERD (*Local Economy Resource Development*) dalam peran serta pemerintah dalam pembangunan pertanian yaitu untuk pengoptimalisasian sektor pertanian. Konsep LERD diharapkan mampu mengatasi permasalahan pengembangan sektor pertanian di Kecamatan

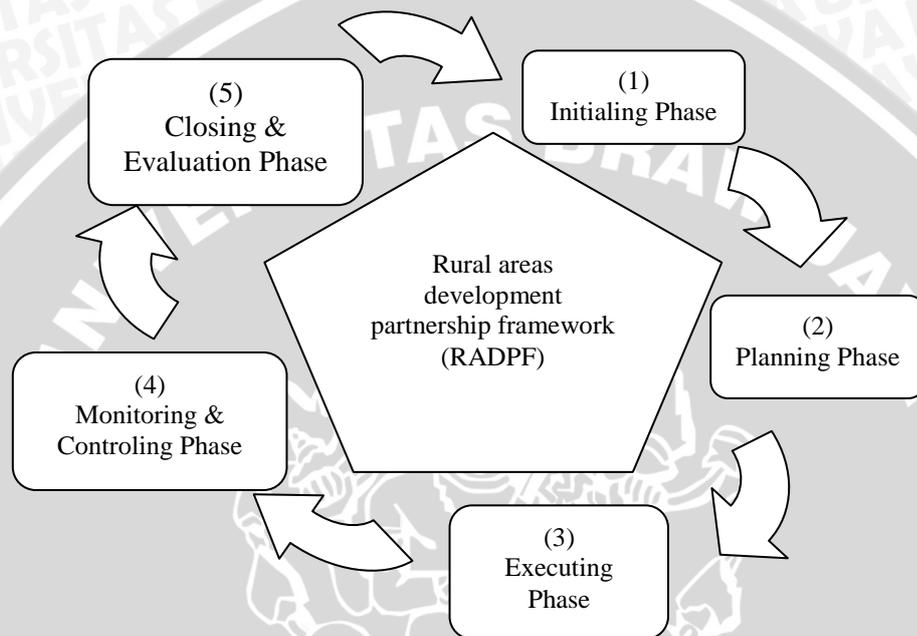
TegaldlimoBanyuwangi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pendapatan dan pengembangan sumberdaya lokal. Hal ini sependapat dengan pernyataan *International Labour Organization* (ILO) tentang pengertian konsep LERD:

“LERD adalah prosespartisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya local dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi”.

Konsep ini digunakan guna meningkatkan 3 (tiga) hal utama dalam pengembangan sektor pertanian khususnya pada Kecamatan Tegaldlimo yang berpotensi pada produk hasil pertanian di Banyuwangi yaitu: Pertama, dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat petani dengan carapemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan atau memberdayakan masyarakat miskin melalui berbagai kegiatan. Kedua, pengembangan sarana dan prasarana serta lingkungan sebagai penunjang ekonomi wilayah dan menciptakan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat petani di Banyuwangi. Ketiga, pengembangan ekonomi antara lain yaitumemanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan meningkatkan pengembangan potensi wilayah.

Untuk itulah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangiyang berkerjasama dengan sector swasta yaitu PT. Pertani berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat petani di Kecamatan Tegaldlimo dengan menerapkan kegiatan-kegiatan yang berfungsi sebagai peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kecamatan Tegaldlimo dalam pengembangan kedelai

Adapun tahapan-tahapan dalam kerangka kemitraan pembangunan daerah menurut Sirbadhoo and Othman (2008) yang dapat dilihat dari gambar dibawah ini:



Sumber: Sirbadhoo and Othman (2008)

Dalam pembangunan sektor pertanian dibutuhkan adanya gambaran seperti diatas, yang biasanya disebut Kerangka Kemitraan Pembangunan, yang meliputi :

- 1) Tahapan memulai pelaksanaan PPP dalam pengembangan sektor pertanian.
- 2) Proses Perencanaan PPP dalam pengembangan sektor pertanian.
- 3) Proses Pelaksanaan PPP dalam pengembangan sektor pertanian.
- 4) Proses mengamati dan mengendalikan PPP dalam pengembangan sektor pertanian.
- 5) Proses mengevaluasi setelah diterapkannya PPP dalam pembangunan sektor pertanian

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian dilapangan, maka poin 1 (satu) dan 2(dua) telah terlaksana dengan adanya kegiatan rapat koordinasi antara Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dan PT.Pertani.dimana dalam rapat tersebut membahas tentang tahapan memulai pelaksanaan dan proses perencanaan PPP dalam pengembangan sektor pertanian yang berkaitan dengan pembagian *job description*daiantaranya yaitu perencanaan kebutuhan sarana produksi (benih dan pupuk).

Sedangkan pada poin 3, 4 dan 5 telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dan PT.Pertani dengan adanya program-program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi khususnya pada bidang pertanian mulai tahun 2010 – 2015, antara lain:

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani yang telah dibahas pada penyajian data sebelumnya, dimana program ini mempunyai kegiatan yang meliputi:
  - a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis ;
  - b. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis ;
  - c. Peningkatan kemampuan lembaga ;
  - d. Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok petani.
  - e. Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur.

Adanya program ini diperuntukkan agar kelompok petani dapat memaksimalkan hasil maupun kemampuannya dalam mengelola tanaman kedelai, sehingga produksi yang akan dihasilkan semakin meningkat. Tujuan program ini dikembangkan adalah agar hasil produksi kedelai Kecamatan Tegaldlimo dapat

semakin di kembangkan, tidak hanya untuk pasok kedelai di Jawa Timur saja tetapi juga se-Indonesia atau bahkan luar negeri, Sehingga Pemerintah tidak lagi perlu membeli kedelai dari luar negeri. Dampak yang ditimbulkan tingkat produksi semakin meningkat, pendapatan daerah juga meningkat, dan kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat.

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunanyang telah dibahas pada penyajian data sebelumnya, dimana program ini mempunyai kegiatan yang meliputi:
  - a. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan;
  - b. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
  - c. Pengembangan pertanian pada lahan kering;
  - d. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan;
  - e. Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan;
  - f. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian ;

Program ini berupa pelatihan langsung dalam pemanfaatan lahan oleh pemerintah, dimana bibit yang ditanamkan diperoleh dari pihak swasta. Program ini berjalan seperti pada kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah, dimana pemerintah turut ikut dalam pengembangan pertanian bersama kelompok tani dengan memanfaatkan pekarangan dan lahan kering atau kosong untuk pengembangan pangan dalam meningkatkan mutu serta produktivitas pangan di Kecamatan Tegaldlimo.

- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/Perkebunan
  - a. Pengembangan pusat etalase/eksibisi/promosi atas hasil produksi Pertanian/Perkebunan;
  - b. Promosi Atas hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan daerah;
  - c. Pemeliharaan Prasarana Distribusi Hasil produksi Pertanian/Perkebunan.

Program ini dapat terimplementasi dengan sangat baik seperti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu Pameran Banyuwangi Inovatif Tahun 2013 dirangkai dengan launching Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!) sejak tanggal 09 November 2013 sampai tanggal 13 November 2013 di Gedung Wanita Paramita Kencana Banyuwangi. Selain Pameran Banyuwangi Inovatif pada tahun 2013, pada tahun yang sama juga diselenggarakan sebuah kegiatan untuk mengimplementasikan program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/Perkebunan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan Pameran Produk Unggulan dan Pelayanan Publik dalam rangka peringatan HUT RI Ke 68 tahun 2013 yang digelar sejak tanggal 24 Agustus 2013 hingga tanggal 26 Agustus 2013 di sepanjang Jalan Diponegoro Banyuwangi dalam event pameran yang kegiatannya dirangkai dengan Peringatan Hari Koperasi Ke-66 tersebut.

Momen ini diharapkan dapat membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Banyuwangi dalam mengakses produk pertanian bermutu dengan harga terjangkau serta menjadi media dalam meningkatkan kesadaran untuk mengkonsumsi dan mencintai produk pertanian lokal/dalam negeri.

- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, meliputi kegiatan :
  - a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna;
  - b. Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam;
  - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pemerintah menyediakan bantuan berupa alat-alat pertanian, berupa mesin traktor untuk membajak sawah sehingga lebih cepat dalam bekerja dibanding menggunakan hewan ternak seperti sapi. Ada mesin pemotong tanaman saat panen kedelai, dan mesin penggiling hasil panen untuk memisahkan hasil panen dari tangkainya, tentunya itu sangat meringankan tenaga para petani disini. dan pemerintah juga member bantuan membangun plengsengan sawah serta sumur bor yang memudahkan petani dalam mengairi sawah utamanya jika musim kemarau tiba.

Pemerintah juga sebagai perantara antara masyarakat dan swasta, dimana swasta yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan para petani, sedangkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan sekaligus mengawasi proses berjalannya program atau kegiatan swasta yang sedang berlangsung maupun mengevaluasinya.

- Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, meliputi kegiatan :
  - a. Pengadaan sarana produksi pertanian/perkebunan;
  - b. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan ;

- c. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan ;
- d. Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan;

Program ini yang berperan sangat penting adalah swasta yaitu PT. Pertani, seperti dalam kegiatan pengadaan sarana produksi pertanian/Perkebunan dan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan karena pemerintah sebagai pembuat program juga memerlukan pihak swasta dalam mendukung keberhasilan program. Dan untuk kegiatan penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Peran swasta yaitu PT. Pertani juga ditugaskan dalam memberikan penyuluhan untuk meningkatkan produksi tanaman kedelai. Namun PT. Pertani hanya sebagai pihak pendukung dan penyuluhan ini tetap harus ada pemerintah yang mendampingi.

- Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, meliputi kegiatan :

- e. Pengadaan sarana produksi pertanian/perkebunan;
- f. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan ;
- g. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan ;
- h. Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan;

Adanya penyuluhan pertanian, seperti berbentuk pelatihan dan sekolah lapang untuk para petani di Kecamatan Tegaldlimo. Kegiatan ini dilaksanakan karena adanya faktor-faktor yang kurang baik dan perlu diperbaiki, termasuk kebutuhan petani dan kebijakan pemerintah. Hal tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk rencana kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka mengubah ketrampilan, pengetahuan, sikap yang semula tidak bisa menjadi bisa, yang semula tidak mau menjadi mau. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh tenaga penyuluhandan

pendampingan bagi pertanian/perkebunan diimplementasikan dengan aksi program SL-PTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu), SL-PTT ini bertujuan untuk mengajarkan kepada petani cara menanam dengan baik. Dengan didukung oleh teknologi-teknologi yang telah disediakan seperti sumur bor yang telah disebutkan sebelumnya.

Untuk mengukur keberhasilan program-program pemerintah yang didukung oleh pihak swasta dalam pengembangan kedelai berbasis LERD ini akan dikaji 10 (sepuluh) faktor yang diharapkan dapat menjadi kunci sukses dalam upaya pengembangan sumberdaya ekonomi local. Menurut Simposium Nasional tahun 2010, yaitu antara lain:

- 1) Mengenal potensi sumberdaya wilayah  
Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam kaitannya untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya wilayah. Sumberdaya potensial bisa jadi pada saat ini belum menunjukkan sesuatu yang berarti namun bila ada upaya-upaya untuk mengembangkannya maka dimungkinkan akan menjadi sesuatu yang unggul.
- 2) Menemukan keunikan produk  
Keunikan produk merupakan keunggulan suatu wilayah, karena tidak terdapat pada wilayah yang lainnya. Kondisi fisik dan lingkungan sangat berpengaruh pada produk hasil pertanian di Kabupaten Banyuwangi.
- 3) Mengembangkan variasi produk  
Variasi produk diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan nilai lebih dari produk olahan.
- 4) Meningkatkan *Performance*  
Penampilan (*performance*) dari suatu produk sangat diperlukan agar supaya produk tersebut bernilai lebih.
- 5) Memperluas pasar dan promosi  
Dewasa ini dengan perkembangan teknologi maka pemasaran dapat dilakukan melalui Internet dengan membangun WEBSITE. Melalui Internet jangkauan pemasaran dapat menjadi lebih luas dengan lebih menghemat biaya transportasi, perjalanan, penyelenggaraan pameran dan lain-lain. Namun kendalanya adalah pada penyiapan pembuatan WEB dan pengelolaannya. Promosi dapat dilakukan melalui WEB disamping melalui pameran.
- 6) Keterkaitan antar sektor dan wilayah

Keterkaitan antar sektor disini maksudnya adalah perlu adanya kerjasama antara sektor yang satu dengan sektor yang lain. Sektor pariwisata dapat dikaitkan dengan sektor industri, demikian juga dengan sektor pertanian dengan industri. Sementara keterkaitan wilayah dapat berupa keterkaitan antar desa sebagai penghasil produk pertanian dengan kota sebagai pasar penjualan produk.

7) Dukungan pemerintah dan kerjasama pemerintah-swasta (*public privat partnership*)

Dukungan dari pemerintah sangat diperlukan dalam memfasilitasi agar produk lebih dikenal oleh pasar. Pemerintah dapat mengangkat produk yang diunggulkan sebagai icon daerah atau membangun image (*image building/ city marketing*). Dalam rangka meningkatkan produksi, pemerintah memberikan lahan secara cuma-cuma kepada petani dengan luasan yang telah ditentukan. Regulasi juga merupakan bagian yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai bagian dari kontrol pengembangan sumberdaya ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang mendukung dan penyediaan infrastruktur juga merupakan bagian yang penting. Di samping itu perlu juga adanya kerjasama antara pemerintah dengan swasta.

8) Insentif bagi pelaku usaha kecil menengah dan investor

Insentif dapat diberikan dalam bentuk kemudahan dalam mendapatkan modal atau dana bantuan bagi usaha kecil menengah, sementara bagi investor dapat berupa kemudahan-kemudahan dalam pengurusan perijinan termasuk lokasi-lokasi strategis untuk usaha .

9) Iklim usaha yang kondusif

Iklim usaha yang kondusif dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada para pengusaha kecil menengah untuk mengembangkan usahanya demikian juga bagi investor.

10) Belajar dari pengalaman yang lain

Belajar dari yang lain dimaksudkan agar dapat dipelajari upaya-upaya atau cara-cara untuk mengembangkan sumberdaya ekonomi lokal. Belajar dapat dilakukan pada wilayah lain yang sudah berhasil dalam mengembangkan suatu produk atau kegiatan ekonomi baik itu di wilayah lain di Indonesia maupun di luar negeri.

Pada poin 1 (satu) dan 9 (sembilan) menyebutkan tentang mengenali potensi sumberdaya wilayah dan iklim usaha yang kondusif, dimana sumberdaya potensial bisa jadi pada saat ini belum menunjukkan sesuatu yang berarti namun bila ada upaya-upaya untuk mengembangkannya maka dimungkinkan akan menjadi sesuatu yang unggul. Hasil di lapangan menunjukkan sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Banyuwangi masih sangat besar. Rata-rata masih

sekitar 50% setiap tahunnya. Hal ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Hanya saja, potensi semacam itu belum dimanfaatkan secara baik karena produk-produk pertanian masih belum terkait secara baik dengan produk-produk olahan. Manakala produk-produk pertanian itu diolah, akan memiliki nilai tambah tersendiri dan akan menjadi sumber daya saing bagi Kabupaten Banyuwangi. Untuk itulah kerjasama antar pihak pemerintah dan swasta diperlukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada agar hasil produksi kedelai Kecamatan Tegaldlimo dapat semakin dikembangkan, tidak hanya untuk pasok kedelai di Jawa Timur saja tetapi juga se-Indonesia atau bahkan luar negeri, Sehingga Pemerintah tidak lagi perlu membeli kedelai dari luar negeri. Dampak yang ditimbulkan tingkat produksi semakin meningkat, pendapatan daerah juga meningkat, dan kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat.

Poin 2 (dua) menyebutkan keberhasilan LERD dengan menemukan keunikan produk dimana Keunikan produk merupakan keunggulan suatu wilayah, karena tidak terdapat pada wilayah yang lainnya. Kabupaten Banyuwangi sebagai penghasil kedelai terbesar di Jawa Timur, dapat dikatakan sektor pertanian yang mendominasi dalam struktur ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Sentra kedelai di Kabupaten Banyuwangi salah satunya berada di Kecamatan Tegaldlimo karena produktivitas/hasil produksi yang dihasilkan oleh kecamatan ini dapat mencukupi kebutuhan komoditas dan pangan nasional setiap tahunnya. Luas wilayah Kecamatan Tegaldlimo sekitar 80,51 km<sup>2</sup>. Kecamatan Tegaldlimo mempunyai wilayah yang terdiri dari 9 wilayah dengan status pedesaan. kelima wilayah desa

tersebut antara lain Purwoasri, Kendalrejo, Kedungasri, Kedungwungu, Tegaldlimo, Wringinpitu, Kedunggebang, Purwoagung dan Kalipait dalam wilayah Kecamatan Tegaldlimo terdapat dua sungai yang melintasi, yaitu sungai kalipait dan sungai mbangeran bermanfaat mengairi hamparan sawah yang luas. selain ketersediaan hamparan sawah yang cukup luas dan potensial itu kontribusi daerah aliran sungai (DAS) mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kesuburan tanah, inilah kondisi fisik dan lingkungan sangat berpengaruh pada produk hasil pertanian di Kabupaten Banyuwangi.

Poin 3 (tiga) menyebutkan keberhasilan LERD adalah mengembangkan variasi produk, di Kecamatan Tegaldlimo saat ini hanya bahan mentah yang langsung dijual langsung kepada pasar tanpa diolah terlebih dahulu. Namun di Kecamatan Glagah dan Kecamatan Gambiran sudah terdapat variasi produk seperti pembuatan kecap dan tempe. Diharapkan dengan adanya PPP di Kecamatan Tegaldlimo mampu meterlibatan *stakeholder* luar terutama pengrajin kedelai baik itu sifatnya UKM atau industri olahan kedelai, yang nantinya sangat mempengaruhi permintaan kedelai yang diproduksi oleh petani, artinya dengan keberadaan industri olahan kedelai akan dapat membantu petani dalam menjual dan mendistribusikan kedelainya dengan harga yang optimal, tanpa merugikan banyak petani kedelai lokal. Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang besar dalam pembentukan dan pengembangan usaha olahan kedelai seperti tahu, tempe dan kecap, hanya saja perlu pendampingan dan pembinaan yang khusus sehingga terbentuk usaha yang mandiri dan berkembang.

Poin 4 (empat) dan 5 (lima) menyebutkan peningkatan *Performancedan* memperluas pasar dan promositelah dilaksanakan dengan adanya Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/Perkebunan yang telah dibahas pada penyajian data sebelumnya yang mempunyai kegiatan:

- a. Pengembangan pusat etalase/eksibisi/promosi atas hasil produksi Pertanian/Perkebunan;
- b. Promosi Atas hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan daerah;
- c. Pemeliharaan Prasarana Distribusdi Hasil produksi Pertanian/Perkebunan.

Poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang menyebutkan keterkaitan antar sektor dan wilayah serta dukungan pemerintah dan kerjasama pemerintah-swasta (*public privat partnership*) telah dilaksanakan, hal ini terbukti dari peran pemerintah yaitu Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi berharap kerjasama dengan pihak swasta ini agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh petani seperti mahalnya harga pupuk dan benih kedelai. Selain itu Pemerintah juga secara rutin memberikan sekolah lapang (SLPTT) dan penyuluhan kepada para petani, upaya ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para petani tentang cara menanam kedelai yang baik sehingga dapat menghasilkan kedelai yang berkualitas baik. Sedangkan peran swasta disini memberikan pupuk, benih serta obat kepada petani dengan harga murah dan kualitas yang baik, selain itu pihak swasta juga ikut dalam memberikan penyuluhan kepada para petani dalam memberikan cara bagaimana menanam kedelai dengan baik. Dan masyarakat yaitu petani di Kecamatan Tegaldlimo

sebagai aktor utama dalam mengelola sumberdaya ekonomi lokalnya yaitu tanaman kedelai.

Poin 8 (delapan) Insentif bagi pelaku usaha kecil menengah dan investor dimana isentif dapat diberikan dalam bentuk kemudahan dalam mendapatkan modal atau dana bantuan bagi usaha kecil menengah, hal ini telah dilaksanakan di Kecamatan Tegaldlimo. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Antok Hadi sebagai Ketua Gapoktan

“Iya ada, dengan adanya program-program yang dikeluarkan pemerintah ini maka masyarakat lebih tau dan paham bagaimana bertani yang baik, lebih mengetahui teknologi yang baik untuk bercocok tanam. Dan tentunya masyarakat petani tidak mengalami kesulitan dalam keuangan atau modal untuk bertani karena pemerintah mengadakan banyak program simpan pinjam, dan bekerjasama dengan PT.Pertani”. (wawancara dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2014 pukul 08.30 WIB)

Sedangkan poin 10 (sepuluh) tentang belajar dari pengalaman yang lain telah dilaksanakan di Kecamatan Tegaldlimo, hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Moch. Djamroni sebagai WIBI Tegaldlimo dan koordinator penyuluh “Intinya Pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah yang salah satunya dengan melakukan study banding dengan kecamatan maju lainnya”. (wawancara dilakukan pada tanggal 02 Mei 2014 pukul 15.15 WIB)

### **4.3.3 Peran masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tegaldlimo setelah pelaksanaan PPP (*Public Privat Partnership*) dalam pengembangan kedelai berbasis LERD (*Local Economic Resource Development*)**

#### **4.3.3.1 Peran Masyarakat Kecamatan Tegaldlimo sebagai aktor yang mendukung pelaksanaan PPP (*Public Privat Partnership*)**

Sumbangan sektor pertanian terhadap pembangunan ditentukan oleh produktivitas dari sektor ini. Karena masih cukup besarnya sumbangan sektor pertanian Kabupaten Banyuwangi terhadap perekonomian nasional, rendahnya produktivitas sektor pertanian dapat mempengaruhi produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, rendahnya produktivitas di sektor pertanian akan memperdalam kesenjangan. Keadaan itu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kestabilan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Karena pembangunan menurut Michael Todaro (dalam Yosin, 2012) merupakan proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

Salah satu unsur utama dalam proses pembangunan yang harus dilakukan adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam setiap perubahan ke arah yang lebih baik dan terencana. Dalam konteks ini partisipasi merupakan salah satu bentuk yang sangat mendasar dan sekaligus mengajak seluruh komponen masyarakat bertanggungjawab dalam setiap proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai pengawasan dan

evaluasi. Tahap pengawasan dan evaluasi dapat dilaksanakan melalui online, hal ini dapat memudahkan pihak pemerintah maupun masyarakat dalam memberikan saran, kritik maupun pertanyaan kepada pihak pemerintah sebagai kontribusi masyarakat untuk mendukung kegiatan pemerintah dan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Karena kontribusi masyarakat atau masyarakat adalah sebagai komponen utama dalam pembangunan.

Pembangunan merupakan hasil keputusan yang ditentukan oleh kebijakan publik, dimana keputusan yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman dalam menjalankan negara serta mengatasi permasalahan yang munculkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan ini pula yang mempengaruhi pembangunan daerah yang dimana keputusan atau kebijakan publik berpengaruh pada seluruh kegiatan aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara berlanjut dan terpadu untuk memperbaiki tatanan kehidupan di daerah ke arah yang lebih baik.

Dalam kerangka inilah pembangunan dapat bermakna jika pembangunan telah memperhatikan masalah-masalah sosial kemanusiaan yang mempunyai indikasi adanya pemerataan pemilikan harta oleh rakyat (Sen dalam Wilber dan Kenneth, 1992:6),

“Pemerataan dan peningkatan kreativitas pertumbuhan disertai pemerataan dan jasmaniah dari kondisi fisik yang sehat dan normal. Kualitas sebagai makhluk sosial terlihat dari kemampuan memberikan pertolongan dalam mewujudkan kebersamaan dengan manusia lain di sekitarnya. Kualitas kemadiriannya, terlihat dari kemampuan meraih sukses dan mengaktualisasikan diri sebagai individu bersama dan dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan kualitas iman/kepercayaan terlihat dari sikap dan perilaku manusia sebagai makhluk Tuhan untuk mewujudkan kehidupan yang sukses secara spiritual”.

Dari hal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa setiap karya pembangunan entah bertaraf lokal, regional, maupun nasional belum bermakna apa-apa jika tidak membimbing manusia yang konkrit kepada nilai-nilai tertentu. Oleh karena itu peran masyarakat dalam hal ini adalah sebagai peran utama dalam pembangunan pertanian khususnya pada bidang tanaman pangan kedelai, dimana yang telah disebutkan bahwa kedelai merupakan komoditas utama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Peran masyarakat dalam pengelolaan pertanian/perkebunan ini sebagai peran kunci dalam pembangunan, karena masyarakat petani inilah yang melakukan semua proses dari mulai menanam hingga memanen dan seterusnya. Tanpa kehadiran atau kontribusi masyarakat maka sama artinya program-program pemerintah tidak ada hasilnya. Selain itu pelaksanaan pengembangan kedelai juga dipengaruhi dari tingkat kualitas tenaga penyuluh dalam menjalankan program penguatan petani yang dilakukan melalui pelatihan dan transfer ilmu pengetahuan serta teknologi melalui Program Sekolah Lapang Penelitian Tanaman Terpadu (SLPTT) yang dilakukan secara berkelompok. SLPTT merupakan bentuk sekolah yang seluruh proses belajar-mengajarnya dilakukan di lahan petani. Para petani diberi pengetahuan pengembangan benih unggul varietas baru, cara mengendalikan hama, cara pemupukan yang berimbang, penggunaan pupuk organik dan lain sebagainya.

Salah satu penyuluhan yang diberikan adalah mengetahui masa panen kedelai dimana petani dapat memperhatikan umur panen yang tepat. Penyuluhan dari pihak pemerintah dan swasta inilah yang akhirnya diterapkan dilapangan. Karena umur panen yang tepat akan menghasilkan jumlah dan mutu produksi kedelai

yang cukup tinggi. Panen terlalu awal mengakibatkan banyaknya biji muda yang akan menjadi butir keriput dalam kondisi kering, dan kurang tahan jika disimpan. Sedangkan panen terlambat dapat menimbulkan kerusakan di lapangan seperti berkecambah, berjamur, busuk, dan berkutu serta kehilangan biji yang disebabkan polong pecah.

Sumbangan sektor pertanian terhadap pembangunan ditentukan oleh produktivitas dari sektor ini. Karena masih cukup besarnya sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian nasional, rendahnya produktivitas sektor pertanian dapat mempengaruhi produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, rendahnya produktivitas di sektor pertanian akan memperdalam kesenjangan. Keadaan itu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kestabilan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Rendahnya produktivitas sektor pertanian, selain disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang bekerja di sektor ini, juga disebabkan oleh masih besarnya proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian.

#### **4.3.3.2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tegaldlimo**

Pembangunan merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara merata di seluruh negara, bagi seluruh masyarakat dan bukan untuk ditujukan untuk kepentingan suatu golongan atau kelompok. Hasil dari pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk peningkatan taraf hidup dan kualitas kehidupan seluruh masyarakat. Menurut Siagian dalam Suryono (2004:21) pembangunan adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan

perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan menurut Tjiptoherijanto dan Manurung (2010:132) mengungkapkan bahwa pembangunan dapat dipandang suatu kebijakan publik yang multidimensi karena pembangunan mencakup dimensi-dimensi ekonomi dan nonekonomi. Sebagai kebijakan publik, pembangunan memiliki karakteristik yang berbeda antara pembangunan yang dilakukan sekarang dan yang akan dilakukan di masa mendatang. Pemerintah mempunyai tujuan yang harus dicapai yaitu tujuan yang berorientasi pada kepentingan rakyat melalui kebijakan publik.

*The United Nations Development Program (UNDP)* (dalam Badruddin, 2009) telah membuat indikator pembangunan. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkul dalam peningkatan *knowledge, attitude* dan *skills*, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat

dan harkat manusia. Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tegaldlimo melalui pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah, tiap-tiap daerah sudah tentu berupaya untuk menggali potensi-potensi pengembangan ekonomi berbasis sumberdaya lokal. Taraf hidup yang baik merupakan tujuan utama bagi petani yang dalam hal ini sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh, akan tetapi padakenyataannya sebagian dari mereka relatif masih berpenghasilan rendah sehingga berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Namun meski begitu di Kecamatan Tegaldlimo sendiri merasa cukup dalam menerima pendapatannya, hal ini sesuai dengan pendapat tokoh masyarakat Kecamatan Tegaldlimo Bapak Widiwongso yang mengatakan “Biasanya petani kecil atau buruh tani itu bekerja mulai pukul 07.00 sampai 15.00 di beri upah sebesar 50ribu perhari, dan saya rasa itu sangat sesuai dan cukup untuk membantu perekonomian petani kecil disini”. (wawancara dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2014 pukul 15.30 WIB)

Untuk mengukur kesejahteraan petani di Kecamatan Tegaldlimo sesuai dengan pendapat Bapak Moch. Djamroni sebagai WIBI Tegaldlimo dan koordinator penyuluh dalam mengukur kesejahteraan masyarakat petani antara lain:

- e. Membandingkan hasil produksi tahun kemarin dengan tahun sekarang.

Di penyajian data telah ditunjukkan tabel mengenai hasil produksi tanaman kedelai di Kecamatan Tegaldlimo dari tahun 2011 hingga tahun 2013, dalam analisis data maka dapat disimpulkan bahwa indikator pertama tingkat kesejahteraan masyarakat petani berhasil meningkat secara signifikan meskipun mengalami penurunan di tahun 2012. Dimana hasil produksi

kedelai pada tahun 2011 mencapai 13.853 kuintal/ha, tahun 2012 menurun menjadi 12.537 kuintal/ha, namun pada tahun 2013 produktivitas ini meningkat pesat sebesar 17.724 kuintal/ha.

- f. Mengukur jumlah petani dalam penduduk dari tahun kemarin dengan tahun sekarang.

Di penyajian data telah ditunjukkan tabel mengenai jumlah penduduk yang berkerja di bidang pertanian di Kecamatan Tegaldlimo tahun 2011-2012, dimana pada tahun 2011 jumlah penduduk yang berkerja di bidang pertanian mencapai 2.039 orang dan meningkat pada tahun 2012 sebesar 2.432 orang. Dapat disimpulkan telah terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Tegaldlimo yang memilih bekerja sebagai petani. Artinya pendapatan di bidang pertanian telah dapat mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Tegaldlimo.

- g. Mengukur pendapatan keseluruhan dari tahun kemarin dengan tahun sekarang.

- f. Tahun 2008 menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 11.482.829,27.
- g. Tahun 2009 menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 12.928.057,07.
- h. Tahun 2010 menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 14.659.053,72.
- i. Tahun 2011 menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 16.758.622,70.
- j. Dan tahun 2012 menunjukkan pendapatan sebesar Rp.18.976.288,17.

Dari pendapatan ini sebagian besar didapatkan dari sektor pertanian.

Semua keberhasilan yang dicapai dalam pengembangan kedelai berbasis LERD di Kecamatan Tegaldlimo tidak terlepas dari kerjasama pemerintah dan

swasta serta masyarakat. Hubungan kemitraan antara setiap unsur (pemerintah, masyarakat dan swasta) sepatutnya dalam berjalan dengan baik jika saja dilandasi oleh prinsip-prinsip sukses yang mendukung keberhasilan sebuah kemitraan. Berikut prinsip-prinsip yang mendukung keberhasilan sebuah kemitraan (Candra, 2006: 51):

- a) **Saling Percaya dan Menghormati**  
Kemitraan yang terbangun secara kelembagaan pada dasarnya dimulai oleh adanya kebutuhan satu pihak terhadap eksistensi dan peran pihak lain, atau kebutuhan semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama mencapai sebuah tujuan yang menjadi kepentingan bersama. Mengingat posisi dan perannya yang sangat penting secara kelembagaan, kemitraan tidak akan terjadi di antara pihak-pihak yang sudah saling mengenal dengan baik satu sama lain sehingga sampai kondisi yang paling tinggi, yaitu saling percaya dan penghormatan satu sama lain. Dengan spirit saling percaya dan penghormatan inilah, pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kemitraan akan dengan mudah melakukan kerja sama melalui praksis berbagai peran, tugas, kewenangan, dan juga melibatkan pertukaran sumber daya.
- b) **Otonomi dan Kedaulatan**  
Salah komponen penting yang menjadi penyusun bangunan kemitraan secara kelembagaan adalah penghargaan terhadap otonomi kelembagaan. Dengan prinsip itu pula, sebuah hubungan kemitraan selayaknya dibangun dan dijalankan melalui kesepakatan seluruh pihak yang terlibat. Prinsip kedua ini secara *logic* merupakan implikasi dari adanya prinsip yang pertama. Dengan adanya saling percaya dan menghormati, pihak-pihak yang membangun kemitraan akan dengan sendirinya memahami dan menghargai eksistensi masing-masing pihak tanpa perlu mencampuri satu terhadap yang lain.
- c) **Saling mengisi**  
Kemitraan dalam pengertian sebagai “interaksi” yang melibatkan sejumlah pihak untuk mencapai tujuan yang disepakati menghajatkan adanya “pertukaran”. Pada pemahaman tersebut, kemitraan sejatinya bertitik tolak atas kesadaran terhadap “keterbatasan” lembaga dan sekaligus melihat adanya “kelebihan” pada pihak lain yang diharapkan dapat menutupinya. Dengan demikian kemitraan secara kelembagaan dibangun berdasarkan prinsip saling mengisi pada semua aspek yang diperlukan untuk itu sehingga diperoleh pencapaian tujuan yang lebih besar dan bermakna pada pengertiannya yang paling luas.
- d) **Keterbukaan dan pertanggungjawaban**  
Meskipun kemitraan dibangun dan dijalankan berdasarkan prinsip saling percaya bukan berarti pihak-pihak yang terlibat di dalamnya terlepas dari kecenderungan untuk menyelewengkan terhadap posisi dan peran yang

dijalankannya. Untuk maksud menjalin berjalannya kemitraan sesuai dengan maksud dan tujuannya, diperlukan adanya prinsip keterbukaan yang memungkinkan semua pihak terlibat dapat mengetahui dengan mudah komitmen dan kinerja masing-masing pihak terhadap kesepakatan yang dibangun bersama. Sedangkan dalam rangka menjamin pemenuhan terhadap pencapaian maksud dan tujuan kemitraan, diperlukan adanya prinsip pertanggung jawaban terhadap semua pelaksanaannya pada tataran praksis. Berjalannya kedua prinsip tersebut di atas akan menjadikan kemitraan menjadi sebuah pilihan rasional dalam menjalankan relasi kelembagaan yang sehat dan positif.

Menurut pendapat Asisten II Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kasumbogo Untung (dalam Kusumaatmadja, 1995: 269) menanggapi mengenai prinsip kemitraan adalah sebagai berikut:

“Kemitraan akan terwujud apabila berbagai orientasi dari semua sub sistem tadi dapat dikoordinasikan, disalurkan, dan atau difokuskan. Keberhasilan dalam menggalang kemitraan dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu produktivitas dan moral/etika”. (Untung, dalam Kusumaatmadja, 1995: 269)

Pendapat Untung tersebut akan menghasilkan sebuah kondisi yang akan mempertajam identifikasi permasalahan yang dihadapi, serta mendukung pilihan terhadap jawaban permasalahan yang akan ditempuh. Dan dua dimensi yang dimaksud oleh Untung adalah produktivitas dan moral/etika, yang berarti dalam segi produktivitas kemitraan akan berhasil bila tujuan kemitraan tersebut secara umum tercapai. Dari segi moral, kemitraan tersebut dinilai berhasil bila tumbuh sikap positif dalam sistem, serta setiap anggota terdorong untuk berpartisipasi penuh dalam mencapai sasaran bersama.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan PPP dalam pengembangan kedelai di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi berbasis LERD, meliputi:

a. Kondisi LERD di Bidang Pertanian dengan Komoditas Tanaman Kedelai pada Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

Kabupaten Banyuwangi sebagai penghasil kedelai terbesar di Jawa Timur produksinya mencapai rata-rata 66.094 ton dengan produktivitas rata-rata mencapai 19,68 ku per ha. Sentra kedelai di Kabupaten Banyuwangi salah satunya berada di Kecamatan Tegaldlimo. Rata-rata produksi dan total produksi kedelai Kecamatan Tegaldlimo menunjukkan produktivitas tanaman kedelai sebesar 13.853 ton pada tahun 2011 dan tahun 2012 menunjukkan produktivitas 10.996,63 kuintal/ha pertahunnya. Produktivitas/hasil produksi ini dapat mencukupi kebutuhan komoditas dan pangan nasional setiap tahunnya.

b. Proses terjadinya PPP di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

PPP di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi telah ada sejak tahun 2007. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkerjasama dengan pihak swasta yaitu PT.Pertani, dimana setiap *stakeholder* memiliki fungsinya masing-masing. Peran pemerintah yaitu Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan secara rutin memberikan sekolah lapang (SLPTT) dan penyuluhan kepada para petani, Sedangkan peran swasta

yaitu PT.Pertani memberikan pupuk, benih serta obat kepada petani dengan harga murah dan kualitas yang baik, upaya ini diharapkan mampu menghasilkan kedelai yang berkualitas baik.

- c. Program-Program yang dilaksanakan dalam Pelaksanaan PPP antara Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dan PT. Pertani Sebagai Pihak Swasta dalam Pengembangan Kedelai Berbasis LERD di Kecamatan Tegaldlimo.

Program-program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi khususnya pada bidang pertanian mulai tahun 2010 – 2015, antara lain:

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani,
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan,
- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/Perkebunan,
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan,
- Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan,
- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan :

2. Peran masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tegaldlimo setelah pelaksanaan PPP dalam pengembangan kedelai berbasis LERD, yang meliputi:

- a. Peran Masyarakat Kecamatan Tegaldlimo sebagai aktor yang mendukung pelaksanaan PPP.

Peran masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah yaitu:

- 1) Pengaduan *online*, pengaduan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi langsung, dimana masyarakat memberikan saran dan kritikan maupun pertanyaan terhadap kinerja pemerintah.
  - 2) Pengelolaan pertanian/perkebunan, Peran masyarakat dalam pengelolaan pertanian/perkebunan ini sebagai peran kunci dalam pembangunan pertanian khususnya tanaman kedelai, masyarakat petani inilah yang melakukan semua proses dari mulai menanam hingga memanen dan seterusnya.
- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tegaldlimo.

- 1) Membandingkan hasil produksi tahun kemarin dengan tahun sekarang.

Pada tahun 2011 produksi kedelai mencapai 18,19 ton serta 13.853 kuintal/ha tanaman kedelai. Tahun 2012 terjadi penurunan produktivitas tanaman kedelai sebesar 12.537 kuintal/ha, meskipun begitu produksi tanaman kedelai terjadi peningkatan yaitu sebesar 20,12 ton tanaman kedelai. Pada tahun 2013 produktivitas tanaman kedelai meningkat pesat sebesar 17.724 kuintal/ha dan 20,18 ton produksi tanaman kedelai.

- 2) Mengukur jumlah petani dalam penduduk dari tahun kemarin dengan tahun sekarang.

Pada tahun 2011 jumlah penduduk yang berkerja di bidang pertanian di Kecamatan Tegaldlimo sebesar 16.519 orang sedangkan tahun 2012 meningkat pesat sebesar 28.227 orang. Dapat disimpulkan

bahwa penduduk yang bekerja sebagai petani meningkat, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Tegaldlimo memilih bekerja sebagai petani.

- 3) Mengukur pendapatan keseluruhan dari tahun kemarin dengan tahun sekarang.

Pendapatan perkapita Kabupaten Banyuwangi,

- k. Tahun 2010 menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 14.659.053,72.
- l. Tahun 2011 menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 16.758.622,70.
- m. Tahun 2012 menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 18.976.288,17.

Dari pendapatan ini sebagian besar didapatkan dari sektor pertanian.

## **B. Saran**

1. Peran pemerintah daerah maupun pihak swasta diharapkan dapat merealisasikan program-program sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan agar biaya maupun tenaga yang dikerahkan dapat lebih efisien dan efektif.
2. Lebih meningkatkan koordinasi seperti musyawarah antar kelompok tani agar dapat menyesuaikan pendapat atas pemikiran yang berbeda-beda. Koordinasi ini juga berfungsi sebagai *job description* bagi masing-masing kelompok tani. Koordinasi ini diharapkan meminimalisir hambatan yang dapat menghentikan proses berjalannya suatu pembangunan yang dapat merugikan masyarakat.
3. Pemerintah daerah maupun masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dalam mengevaluasi program-program dan melaksanakan perbaikan-perbaikan yang merupakan masukan/rekomendasi dari masyarakat/kelompok tani.